



# KLHS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

**RPJPD** RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2045



Andy Mizwar  
Maya Amalia  
Muhammad Abrar Firdausy  
Muhammad Azwar Ramadhani  
Muhammad Akbar  
Lenalda Febriany Santosa

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis**  
**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**  
**Kabupaten Tapin 2025 - 2045**

**Andy Mizwar**  
**Maya Amalia**  
**Muhammad Abrar Firdausy**  
**Muhammad Azwar Ramadhani**  
**Lenalda Febriany Santosa**  
**Muhammad Akbar**



# **Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2025 - 2045**

Penulis:

Andy Mizwar

Maya Amalia

Muhammad Abrar Firdausy

Muhammad Azwar Ramadhani

Lenalda Febriany Santosa

Muhammad Akbar

Cetakan Pertama:

## **PENERBIT:**

ULM Press, 2024

d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan ULM

Lantai 2 Gedung Perpustakaan Pusat ULM

Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin 70123

Telp/Fax. 0511 - 3305195

ANGGOTA APPTI (004.035.1.03.2018)

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin  
tertulis dari Penerbit, kecuali

untuk kutipan singkat demi penelitian ilmiah dan resensi

I - V + 50 hal, 15,5 × 23 cm

Cetakan Pertama. ... 2024

ISBN : ...

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2025-2045*. Buku ini merupakan hasil kerjasama UPA Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sangat membantu dalam pembuatan buku ini, khususnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapin yang telah memberikan izin publikasi, dan Tim POKJA KLHS RPJPD Kabupaten Tapin atas kerjasamanya selama pelaksanaan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang membangun dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini. Terima kasih.

Oktober, 2024

**Penulis**

## **PRAKATA**

Buku *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2025-2045* ini menjelaskan tentang daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Tapin, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045. Kami berusaha menghadirkan analisis yang komprehensif dan menyeluruh dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Buku ini terutama ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai panduan dalam menyusun RPJPD 2025-2045, namun juga relevan untuk kalangan luas yang ingin memahami tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui analisis data dan rekomendasi yang disampaikan, kami berharap buku ini dapat menjadi acuan strategis yang berharga dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk mempertahankan daya dukung lingku-

ngan hidup agar tetap mampu mendukung aktivitas sosial-ekonomi dan pembangunan di masa depan.

Semoga karya ini memberikan manfaat yang nyata dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita untuk membangun daerah yang lebih baik, serta menginspirasi berbagai pihak untuk terus memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.

Oktober, 2024

**Penulis**

## SINOPSIS

Penyusunan “**KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045**” merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini menyoroti capaian dan tantangan pembangunan daerah selama periode RPJPD 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka strategis untuk RPJPD 2025-2045 yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Buku ini membahas analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tapin pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan,

seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Prakata .....	ii
Sinopsis .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJPD .....	4
D. Metodologi Penyusunan KLHS RPJPD .....	7
<b>Bab 2 Kondisi Umum Kabupaten Tapin .....</b>	<b>11</b>
A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi .....	11
B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional .....	12
C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin .....	15
D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH .....	16
E. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	20
F. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	22
G. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan .....	23
H. Ringkasan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025 .....	24
<b>Bab 3 Capaian Tujuan Pembangunan     Berkelanjutan Kabupaten Tapin .....</b>	<b>33</b>
A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan .....	33
B. Analisis Capaian Indikator TPB .....	36

C. Proyeksi Capaian Indikator TPB .....	37
D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB .....	39
<b>Bab 4 Perumusan Isu Pembangunan</b>	
<b>Berkelanjutan Strategis</b> .....	43
A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB .....	43
B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis .....	48
C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik .....	49
D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan .....	50
E. Analisis Isu Prioritas .....	52
<b>Bab 5 Alternatif Skenario dan Rekomendasi</b> ....	55
A. Tanpa Upaya Tambahan .....	55
B. Dengan Upaya Tambahan .....	55
<b>Bab 6 Kesimpulan</b> .....	106
Daftar Pustaka .....	110
Glosarium .....	111
Profil Penulis .....	112
Sinopsis Buku .....	116

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Pada periode 2005-2025, capaian pembangunan Kabupaten Tapin di sisi kesejahteraan penduduk menunjukkan kondisi yang membaik [1]. Persentase angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,12% pada tahun 2005 menjadi 3,60% pada tahun 2021. Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan angka pengangguran dari 8,52% di tahun 2015 menjadi 4,96 di tahun 2021. Sementara itu, pembangunan sumberdaya manusia juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 sebesar 64,89 dan naik hampir lima poin menjadi 70,31

pada tahun 2021. Peningkatan IPM ini merupakan hasil dari peningkatan Usia Harapan Hidup (70,40 di tahun 2020 menjadi 74,09 di tahun 2021), lama sekolah, serta peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan melalui peningkatan konsumsi per kapita [2].

Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan PDRB tahun 2021 mencapai 3,41%. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2020 (-1,49%) yang terimbas kondisi pandemi Covid-19, namun cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 (4,05%). Sementara itu, PDB per-kapita Kabupaten Tapin mengalami peningkatan yang sangat signifikan (122,84%). Pada tahun 2005 PDB per-kapita tercatat sebesar Rp. 6,38 juta, lalu masing-masing meningkat menjadi Rp. 24,12 juta pada tahun 2010, Rp. 35,61 juta pada tahun 2015, Rp. 44,42 juta pada tahun 2020 dan Rp. 47,17 juta pada tahun 2021. Pencapaian indikator makro tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Tapin menunjukkan tren pertumbuhan yang positif [2].

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pembuatan KLHS untuk RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 sebagai wujud komitmen skenario pembangunan berkelanjutan 20 tahun ke depan. KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJPD. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), yang berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD bersifat *ex-ante* atau dilakukan sebelum perumusan kebijakan rencana dan program (KRP), dan menjadi satu kesatuan dalam proses pembuatan RPJPD. Pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

## **B. Maksud dan Tujuan**

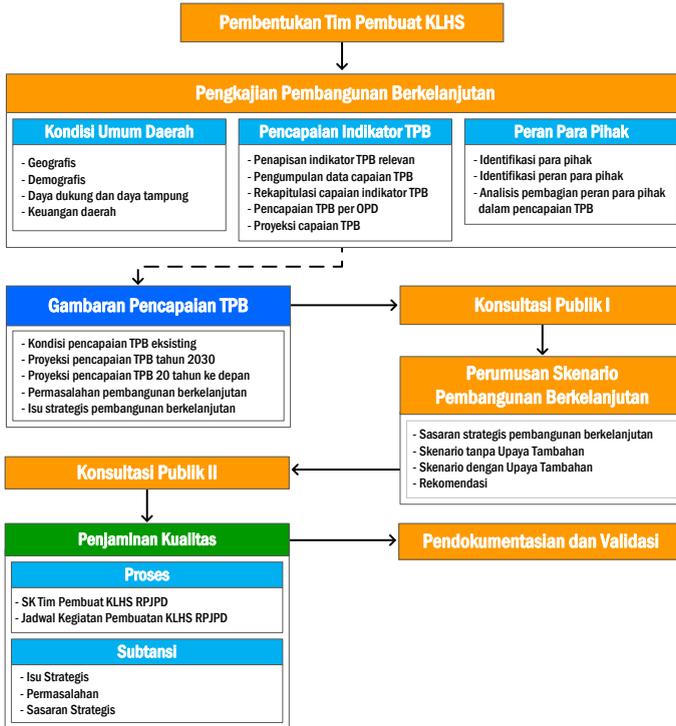
Maksud pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa isu dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2025-2045.

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 adalah :

- 1) Menganalisis daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Tapin;
- 2) Menganalisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005 – 2025;
- 3) Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB.

### C. Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJPD

Mengacu pada Permendagri No. 07 Tahun 2018 tahapan penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 sebagai berikut (**Gambar 1**):



**Gambar 1.** Mekanisme pembuatan KLHS RPJMD/RPJPD

#### 1) Pembentukan tim pembuat KLHS

Tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025 – 2045 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/095/KUM/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin. Tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin bersama dengan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tapin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapin.

Anggota tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 terdiri atas perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJPD. Tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 melibatkan akademisi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin No. 600.4.3.2/32-SEK/DLH/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pembuatan dan Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin

## 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup: (a) kondisi umum daerah; (b) capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, dan (c) pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasilnya adalah gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

## 3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mengacu pada hasil

pengkajian pembangunan berkelanjutan dan konsultasi publik. Hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa rekomendasi sasaran dan arah kebijakan berdasarkan target pencapaian tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

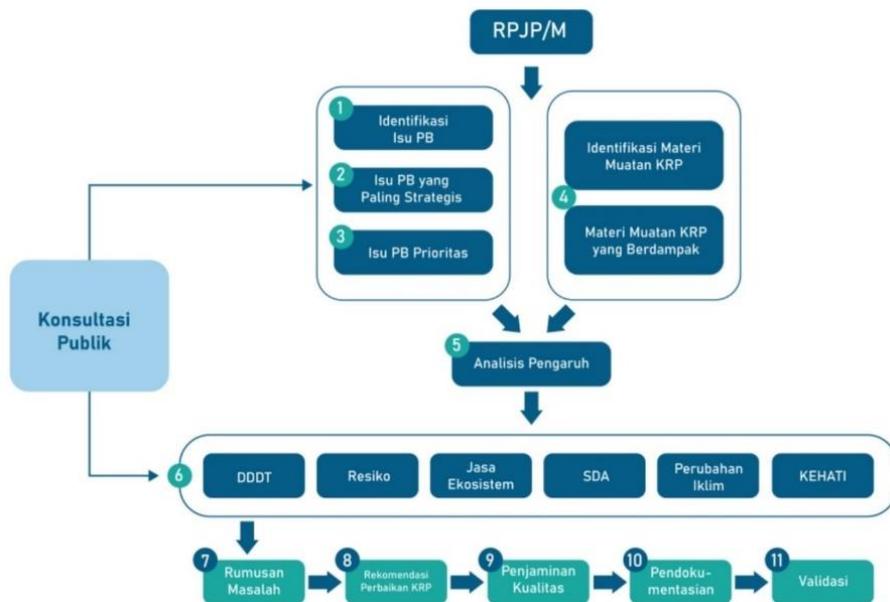
Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB dengan memperhatikan: (a) pencapaian target tanpa upaya tambahan, (b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, (c) potensi, daya saing dan inovasi daerah, (d) daya dukung dan daya tampung daerah, dan (e) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### 4) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS dan kualitas substansi KLHS. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS dibuktikan dengan: (a) ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS, (b) jadwal kegiatan pembuatan KLHS, (c) berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan, dan (d) laporan KLHS (laporan induk, ringkasan eksekutif dan tahapan proses pembuatan KLHS). Penjaminan kualitas substansi KLHS untuk memastikan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

#### D. Metodologi Penyusunan KLHS RPJPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagai berikut (**Gambar 2**):



**Gambar 2.** Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

#### 1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS

a. Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan tahapan:

- Melakukan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis.
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup untuk menemukan dan menentukan muatan KRP yang harus

dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

- Melakukan analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Analisis pengaruh dilakukan dengan cara memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan isu PB Paling Strategis.
  - Melakukan analisis kajian muatan KLHS pada setiap materi muatan KRP yang berpengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan 6 (enam) muatan KLHS: (a) daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, (b) risiko dampak dan kerusakan Lingkungan Hidup, (c) kinerja jasa lingkungan, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil analisis kajian muatan KLHS menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan KRP.
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
- Alternatif penyempurnaan KRP berupa: (a) perubahan tujuan atau target, (b) perubahan strategi pencapaian target, (c) perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan, (d) perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan

Pembangunan Berkelanjutan, (e) penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan, (f) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem, dan/atau (g) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat: (a) materi perbaikan KRP, dan/atau (b) informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

- 2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen KRP.

### 3) Validasi KLHS

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **Bab 2**

# **Kondisi Umum Kabupaten Tapin**

### **A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi**

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau terletak antara koordinat  $2^{\circ} 31' 35,472''$  sampai  $3^{\circ} 11' 46''$  Lintang Selatan dan antara  $114^{\circ} 47' 56,969''$  sampai  $115^{\circ} 30' 21,992''$  Bujur Timur dengan luas  $\pm 2.155,94$  km<sup>2</sup> atau sekitar 5,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tapin berada di bagian tengah dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi dan kedudukan ini sangat strategis, karena dekat dengan Kabupaten Banjar (pusat perdagangan dan distribusi Kalimantan Selatan) dan Kota Banjarbaru (ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan) dan merupakan jalur trans Kalimantan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara;
- 2) Sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Banjar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan);
- 3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

Secara administratif, Kabupaten Tapin terdiri 12 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 122 desa, sebagaimana disajikan pada **Tabel 1** dan **Gambar 3**.

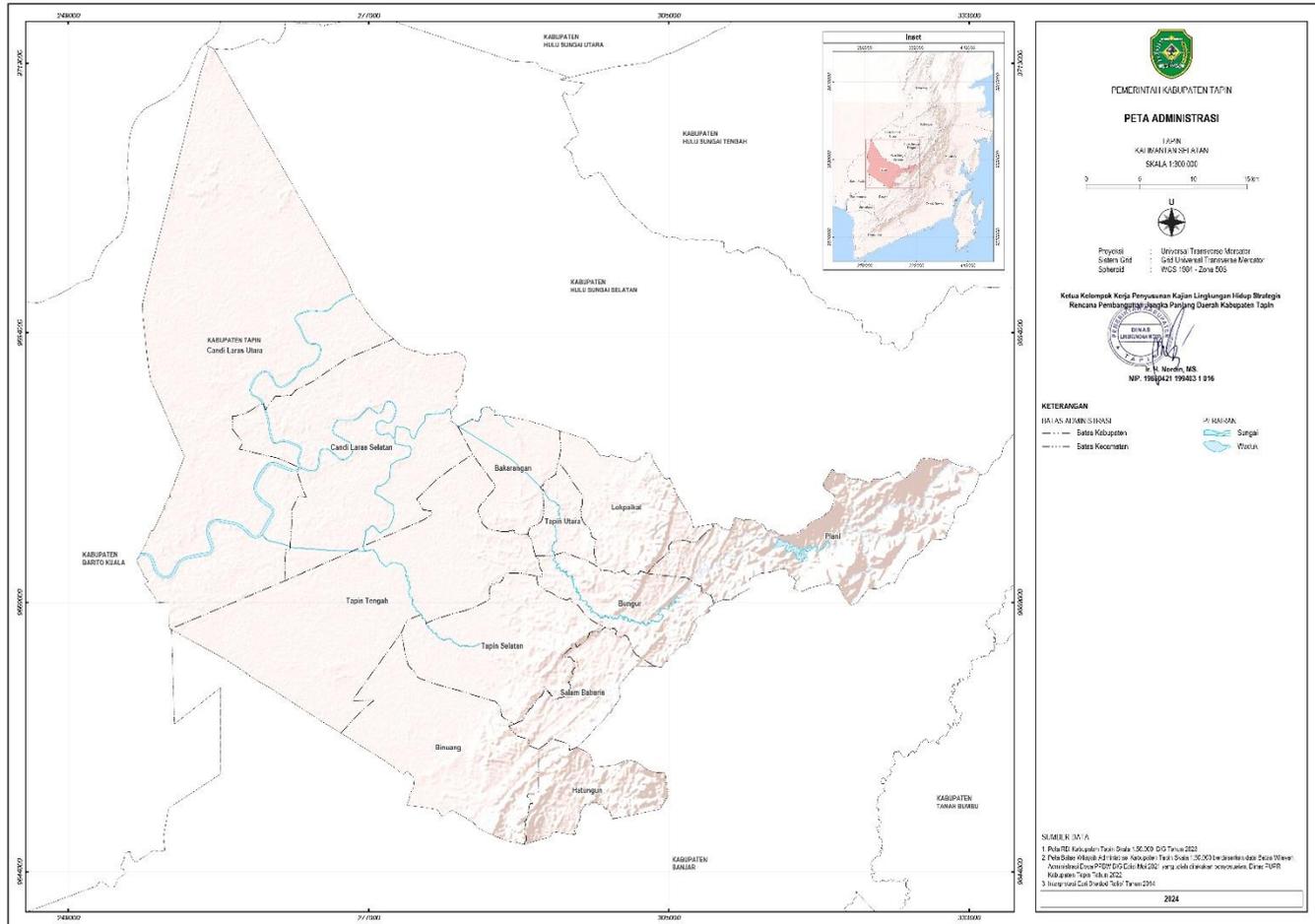
**Tabel 1.** Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1	Binuang	8	3	177.35	8,23
2	Hatungun	8	-	71.46	3,31
3	Tapin Selatan	10	1	145.35	6,74
4	Salam Babaris	6	-	64.33	2,98
5	Tapin Tengah	17	-	315.61	14,64
6	Bungur	12	-	87.63	4,06
7	Piani	8	-	193.87	8,99
8	Lokpaikat	8	1	98.08	4,55
9	Tapin Utara	12	4	32.94	1,53
10	Bakarangan	8	-	70.33	3,26
11	Candi Laras Selatan	12	-	277.90	12,89
12	Candi Laras Utara	13	-	621.04	28,81
<b>Jumlah</b>		<b>122</b>	<b>9</b>	<b>2,155.94</b>	<b>100</b>

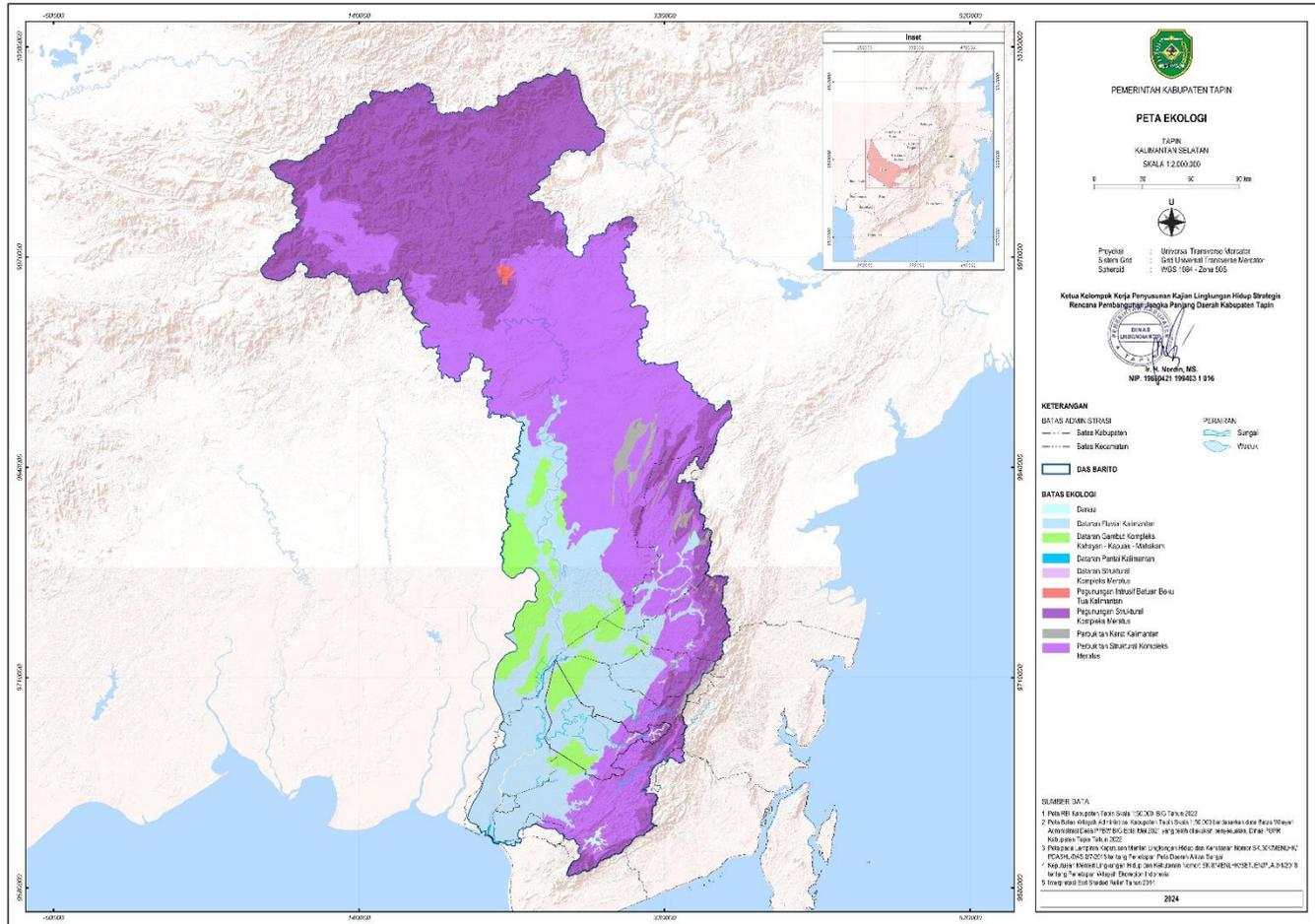
Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

## B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional

Penentuan batas wilayah fungsional (batas ekologi) dilakukan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, dan batas Wilayah Ekoregion sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 (**Gambar 4**). Mengacu pada batas DAS, Kabupaten Tapin berada pada DAS Barito yang meliputi wilayah ekoregion Dataran Fluvial Kuala Kuayan, dan Pegunungan Struktural Meratus.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Gambar 4. Peta Batas Wilayah Fungsional

### C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin

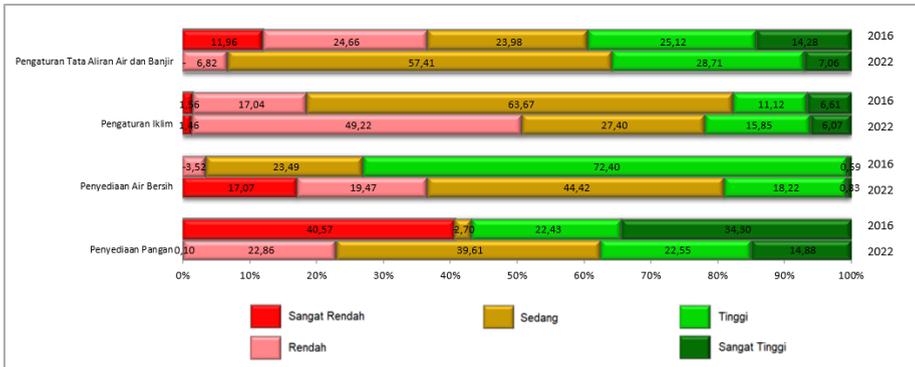
Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan. Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah [3], jasa lingkungan ditentukan berdasarkan karakteristik bentang alam, vegetasi alami dan penutupan lahan yang ditentukan bobot dan skor masing-masing parameternya.

Penentuan kinerja jasa lingkungan Kabupaten Tapin mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022). Untuk mengetahui kecenderungan perubahan jasa lingkungan, maka pada kajian ini juga disajikan data pembandingan kondisi jasa lingkungan Kabupaten Tapin tahun 2016, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2** dan **Gambar 5**.

**Tabel 2.** Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin

Jasa Lingkungan	Sangat Tinggi (Km <sup>2</sup> )	Tinggi (Km <sup>2</sup> )	Sedang (Km <sup>2</sup> )	Rendah (Km <sup>2</sup> )	Sangat Rendah (Km <sup>2</sup> )
Penyediaan Pangan	32,093	48,64	85,43	49,3	207
Penyediaan Air Bersih	1,787	39,29	95,80	41,994	36,811
Pengaturan Kualitas Udara	13,38	24,57	61,402	115,37	951
Pengaturan Iklim	13,09	34,20	59,094	106,15	3,142
Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Alam	13,39	77,256	9,222	80,835	34,974
Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	15,23	61,92	123,822	14,701	-
Pemurnian Air & Pengolahan Air Limbah	-	12,876	35,868	18,971	148,004

Sumber : DLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022)



**Gambar 5.** Kecenderungan Perubahan Kondisi Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin Tahun 2016-2022

Berdasarkan **Gambar 5** diketahui bahwa jasa penyediaan pangan, penyediaan air bersih, pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir dan pemurnian air dan pengolahan air limbah cenderung mengalami penurunan seiring dengan penurunan prosentase tingkat jasa lingkungan sangat tinggi dan tinggi, serta meningkatnya prosentase jasa lingkungan kategori sedang.

#### **D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH**

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Penentuan D3TLH Kabupaten Tapin mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut.

### 1) Daya dukung lahan permukiman

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Penentuan daya dukung lahan permukiman (DDL<sub>Pm</sub>) berdasarkan perbandingan luas lahan permukiman dengan luas kebutuhan lahan permukiman [4]. Semakin tinggi DDL<sub>Pm</sub> maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan permukiman.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 194.628 jiwa dan asumsi kebutuhan lahan permukiman layak 60 m<sup>2</sup>/orang maka kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Tapin ± 11.677.680 m<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di Kabupaten Tapin tahun 2022 seluas ± 34.389.173 m<sup>2</sup>. Dengan demikian, DDL<sub>Pm</sub> Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,9 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 570.012 jiwa.

### 2) Daya dukung pangan

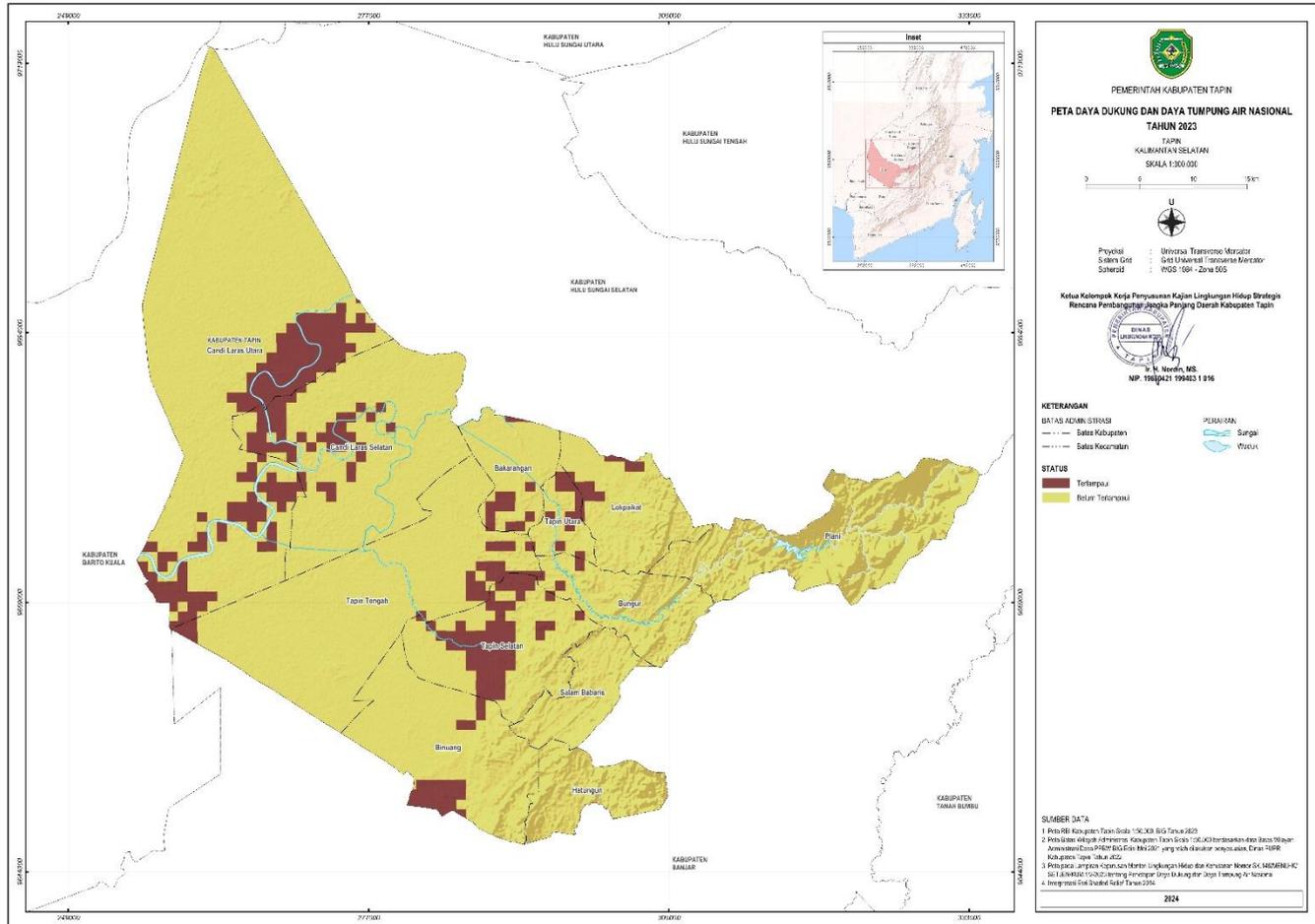
Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan (DDP<sub>n</sub>) berdasarkan perbandingan jumlah produksi dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama [5]. Semakin tinggi DDP<sub>n</sub> maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 194.628 jiwa dan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka jumlah konsumsi beras di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 24.134 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 104.741,11 ton atau setara dengan 61.975 ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, DDPn Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,57 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga  $\pm$  499.089 penduduk.

### 3) Daya dukung air

Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan air.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, diketahui bahwa 9,13% (19.725 Km<sup>2</sup>) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah melampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), sedangkan 90,87% (196.428 Km<sup>2</sup>) berstatus belum melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada **Gambar 6**.

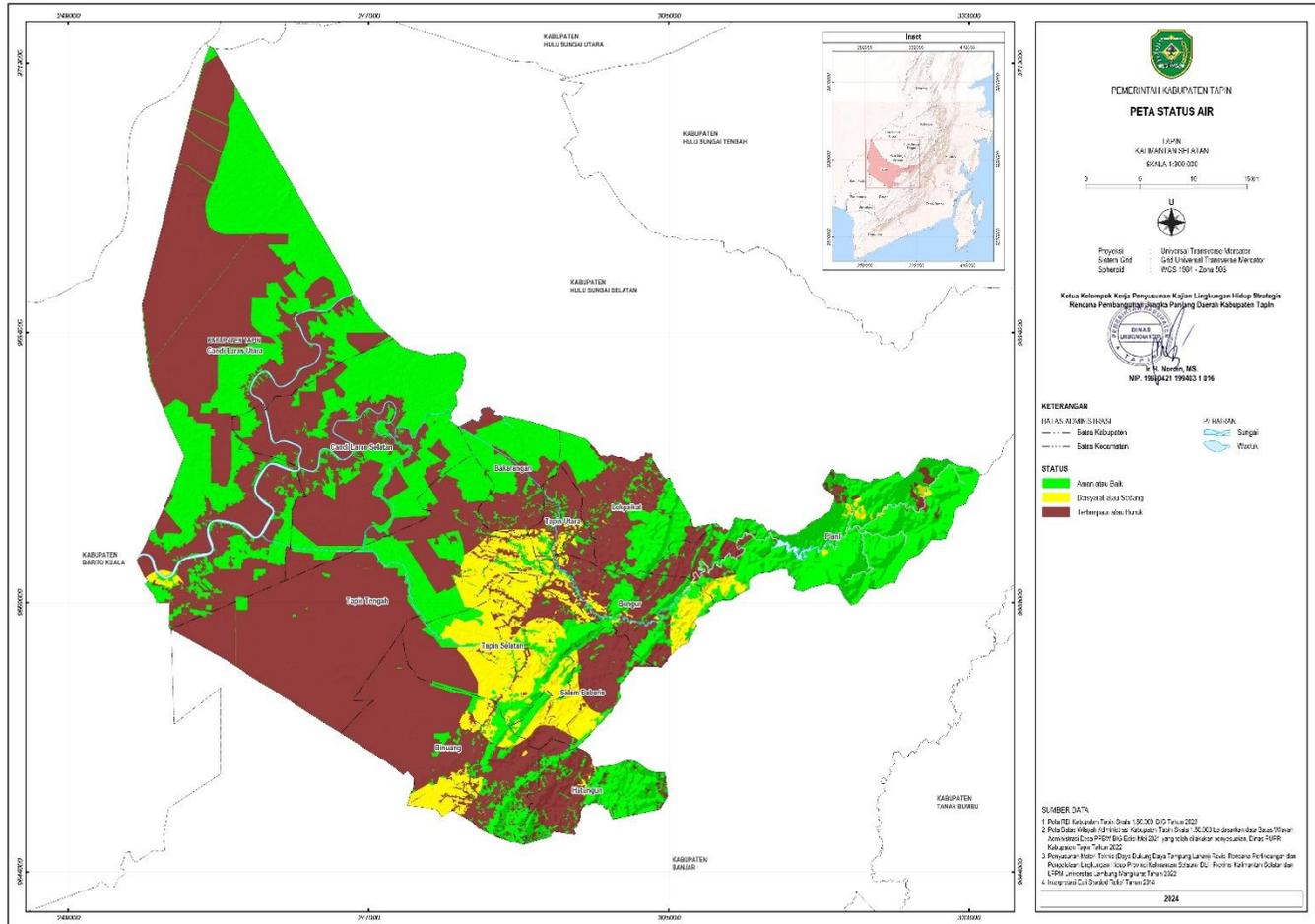


Gambar 6. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Tapin

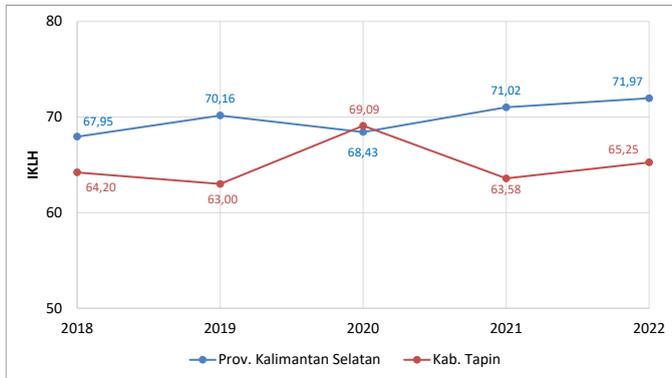
Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) diketahui bahwa 53,08% (114.477 Km<sup>2</sup>) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah buruk/terlampau (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 8,11% (17.489 Km<sup>2</sup>) berstatus sedang/bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan air), dan 38,81% (83.709 Km<sup>2</sup>) berstatus belum baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 1.722.969.404 m<sup>3</sup>/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.175.877.095 m<sup>3</sup>/tahun (kebutuhan domestik 5.532.670 m<sup>3</sup>/tahun dan non-domestik 2.170.344.425 m<sup>3</sup>/tahun), maka DDA Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 0,79 yang berarti termasuk dalam kategori “buruk/terlampau” sebagaimana disajikan pada **Gambar 7**.

#### **E. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum IKLH Kabupaten Tapin tahun 2018-2022 berada pada kategori sedang (**Gambar 8**). Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik.



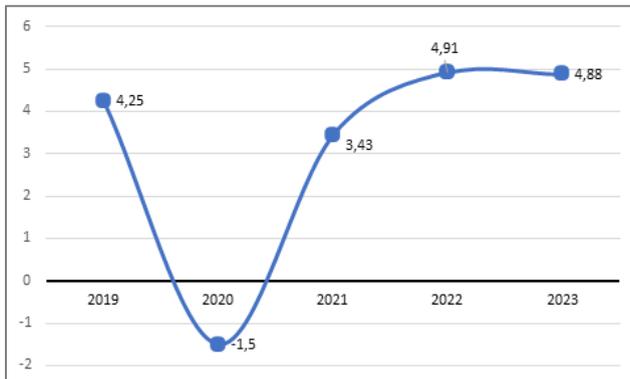
Gambar 7. Peta Status Air Kabupaten Tapin



**Gambar 8.** Tren IKLH Kabupaten Tapin 2018-2022

## F. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin tahun 2018-2022, secara umum ekonomi Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan positif, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (**Gambar 9**). Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh peningkatan sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa.

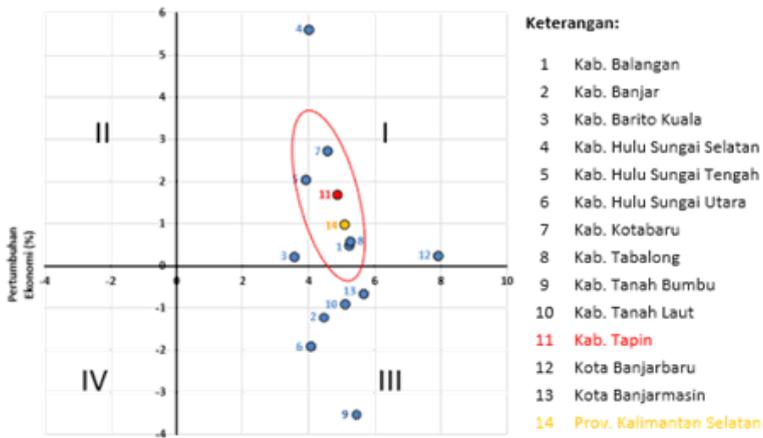


**Gambar 9.** Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin (%)

## G. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan adalah dengan analisis kuadran melalui tipologi Klassen [6] yang ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan diselaraskan dengan kelestarian lingkungan [7]. Pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sedangkan perubahan kondisi lingkungan ditentukan berdasarkan perubahan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 6.898,88 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,91% [2]. Berdasarkan data DLH Provinsi Kalimantan Selatan (2023), nilai IKLH Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah 63,58 dan pada tahun 2022 adalah 65,25 ( $\Delta$  IKLH = 1,67). Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) 92,02 pada tahun dan naik menjadi 92,05 pada tahun 2022 ( $\Delta$  IKU = 0,03). Kondisi yang sama juga terjadi pada kualitas air, dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 52,80 pada tahun 2021 dan naik menjadi 56,84 pada tahun 2022 ( $\Delta$  IKA = 4,04). Sementara itu, nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) 29,50 pada tahun 2021 dan naik menjadi 30,09 pada tahun 2022 ( $\Delta$  IKL = 0,59). Hasil analisis kuadran pembangunan berkelanjutan disajikan pada **Gambar 10**.



**Gambar 10.** Kuadran Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin Tahun 2022

Posisi Kabupaten Tapin berada di Kuadran I, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 (4,91%) masih dapat didukung sesuai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ( $\Delta$  IKLH = 1,67). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

#### H. Ringkasan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah "*Tapin yang religius dan sejahtera*". Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan Kabupaten Tapin dilakukan berdasarkan lima misi, sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang berdaya saing
- Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan
- Misi 4 : Mewujudkan ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan
- Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)

Tujuan, sasaran dan indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 disajikan pada **Tabel 3**. Selanjutnya masing-masing sasaran ditentukan arah, tahapan dan prioritas pembangunan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4**.

**Tabel 3.** Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
<b>Visi: Tapin yang religius dan sejahtera</b>			
<b>Misi 1:</b> Mewujudkan masyarakat Tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya	1. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman agama dalam manifestasi etos dan budaya kerja serta perilaku akhlak mulia dalam tatanan sosial	Peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat	a. Keterpenuhan sarana peribadahan yang di tandai oleh rasio tempat ibadah dengan penduduk yang semakin memadai b. Meningkatnya jemaah masjid, majelis ta'lim, jemaah haji c. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan agama dan pengkajian d. Meningkatnya toleransi antar umat beragama e. Meningkatnya manifestasi perilaku akhlak mulia dan kebajikan sosial dalam masyarakat
<b>Misi 2:</b> Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing	2. Tercapainya IPM Kabupaten Tapin pada posisi sejajar dengan Kabupaten dan Kota maju di Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	a. Angka melek huruf mencapai di atas 97 % b. Rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 12 tahun c. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru, dan murid berada pada posisi sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di Kalimantan Selatan d. AHH di atas/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan e. AKB,AKI melahirkan terus mengalami penurunan dan berada di bawah/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan f. Rasio Posyandu/satuan balita, rasio puskesmas/pustu per satuan penduduk, Rasio rumah sakit/satuan penduduk, rasio dokter/ satuan penduduk, rasio tenaga medis/ satuan penduduk berada sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di Kalimantan Selatan g. DBM minimal sama dengan/mendekati rata-rata DBM masyarakat propinsi Kalsel
<b>Misi 3:</b> Mewujudkan Perekononian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan	3. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kab. Tapin pada posisi sejajar dengan Kabupaten dan Kota yang maju di KalSel	Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh SDA yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung SDM yang handal	a. Struktur Perekonomian semakin bergeser dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor non pertanian baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja b. Pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan PDRB di atas/mendekati rata-rata propinsi Kalimantan Selatan c. Pendapatan perkapita /nilai PDRB perkapita minimal sama dengan/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Laju Inflasi di bawah rata-rata laju inflasi Nasional</li> <li>e. Indeks gini distribusi pendapatan minimal sama dengan/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>f. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>g. Persentase penduduk bekerja/ tidak menganggur di atas 90 % dan angka partisipasi kerja semakin meningkat</li> <li>h. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani di atas rata-rata Kalimantan Selatan/ semakin meningkat</li> <li>i. Kegiatan kepemudaan, olah raga dan seni budaya semakin berkembang</li> <li>j. Kesetaraan gender, partisipasi perempuan dan pengambilan kebijakan dan manajemen pembangunan serta perlindungan anak</li> <li>k. Penurunan angka KDRT terus membaik di atas rata-rata propinsi Kalimantan Selatan</li> </ul>
<p><b>Misi 4:</b> Mewujudkan ketersediaan infrastruktur diberbagai bidang dan kawasan</p>	<p>4. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan SDA Kabupaten Tapin secara sejajar dengan Kabupaten dan Kota yang maju di Kalimantan Selatan</p>	<p>Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan rantau baru, margasari baru, binuang baru yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW, terpeliharanya proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, rasio RTH per satuan luas wilayah yang ideal, rasio bangunan yang memiliki IMB per jumlah bangunan yang semakin kuat, luas wilayah perkotaan yang semakin proporsional, luas wilayah industri/kawasan ekonomi khusus yang semakin proporsional, luas wilayah kebanjiran &amp; kekeringan yang semakin berkurang</li> <li>b. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kawasan rantau baru, margasari dan binuang baru</li> <li>c. Semakin optimalnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan yang ditandai oleh tingkat pencemaran yang terjaga pada ambang toleransi dan luas lahan kritis yang semakin berkurang atau minimal tidak bertambah</li> <li>d. Tertanganinya dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan baik</li> <li>e. Aksesibilitas daerah meningkat signifikan melalui keterpatuhan sarana-prasarana transportasi darat yang menjangkau seluruh desa/kelurahan, dilihat dari perbaikan dalam rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,</li> </ul>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			<p>proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik, jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum</p> <p>f. Berkembangnya fasilitas wilayah dilihat dari fasilitas perekonomian dan fasilitas publik</p> <p>g. Iklim berinvestasi yang kondusif bagi penanaman modal baik PMA maupun PMDN</p>
<p><b>Misi 5:</b> Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</p>	<p>5. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif-efisien dan memuaskan masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan pemerintahan</p>	<p>Peningkatan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat</p>	<p>a. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis</p> <p>b. Semakin efektif dan efisiennya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan menjangkau seluruh wilayah</p> <p>c. Meningkatnya kinerja hasil layanan dan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha pada berbagai bidang pelayanan yang dapat dilihat dari IKM</p> <p>d. Semakin meningkatnya kualitas SDM pemerintah yang sesuai tuntutan tugas pokok dan fungsinya</p> <p>e. Meningkatnya apaatur pemerintah daerah yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa</p> <p>f. Meningkatnya penegakan dan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat</p>

**Tabel 4.** Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025

Prioritas /Tujuan/ Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin	Penataan kelembagaan pemerintah guna meletakkan landasan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pelayanan yang memuaskan, serta perwujudan daya saing perekonomian sebagai landasan bagi akselerasi pertumbuhan	Peningkatan akselerasi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan yang bertumpu di desa, dan pengembangan infrastruktur wilayah	Pemantapan pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia guna mendukung kemajuan daerah	Peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga periode sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarkan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut
<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya</b>				
Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan agama serta semakin berfungsinya nilai dan ajaran agama dalam manifestasi etos dan budaya kerja serta perilaku akhlak mulia dalam tatanan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penghayatan dan pengamalan ajaran agama khususnya agama islam yang tidak hanya termanifestasikan dalam ritual ibadah tetapi juga menjelma sebagai landasan perilaku dan tindakan sosial masyarakat</li> <li>2) Toleransi beragama diharapkan semakin terjaga dan sarana beribadah tercukupi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semaraknya pendidikan anak usia dini dan agama</li> <li>2) Rasio tempat ibadah persatuan penduduk meningkat</li> <li>3) Guru dan tempat belajar mengaji bagi anak usia dini meningkat</li> <li>4) Kelompok majelis taklim meningkat</li> <li>5) Jemaah masjid meningkat</li> <li>6) Penyelenggaraan haji terkelola semakin baik</li> </ol>	Pencapaian dalam keterpenuhan sarana peribadahan, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, manifestasi ajaran agama sebagai etos kerja serta manifestasi ajaran agama dalam perilaku akhlak mulia semakin meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatritkan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum</li> <li>2) Berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin</li> </ol>

Prioritas /Tujuan/ Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
<b>Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing</b>				
Peningkatan kualitas manusia merupakan muara dari pencapaian seluruh upaya pembangunan, kualitas manusia menjadi prioritas utama karena terkait langsung dengan pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas SDM dari segi pendidikan dan kesehatan</li> <li>2) Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur</li> <li>3) Penataan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> <li>4) Perbaikan sistem pelayanan publik</li> <li>5) IPM 76</li> <li>6) Wajar 9 tahun</li> <li>7) Usia Harapan Hidup 64 tahun</li> <li>8) Turunnya angka kematian Ibu dan Ana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberantasan buta-huruf dituntaskan</li> <li>2) Angka putus sekolah ditekan</li> <li>3) Kualitas guru dan proses belajar mengajar diperbaiki</li> <li>4) Pengembangan pendidikan tinggi</li> <li>5) Meningkatkan IPM 76,50</li> <li>6) Meningkatkan Wajar 12 tahun</li> <li>7) Usia Harapan Hidup 66 tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan IPM 77</li> <li>2) Meningkatkan Wajar 12 tahun</li> <li>3) Meningkatkan Usia Harapan Hidup 68 tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>2) Kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk pemanusiaan manusia itu sendiri</li> </ol>
<b>Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan</b>				
Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 48,39 %</li> <li>2) Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB 16,66 %</li> <li>3) Kontribusi sektor keuangan, persewaan &amp; jasa terhadap PDRB 15 %</li> <li>4) Penyerapan TK sektor pertanian 50 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target MDG's</li> <li>2) Pembangunan agribisnis difokuskan pada terbangunnya desa-desa sebagai basis peningkatan produksi pertanian dalam arti luas</li> <li>3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 8,35%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantapan sistem agribisnis yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan desadesa sekitarnya kearah terpenuhinya unsur-unsur sebagai kawasan agropolitan</li> <li>2) Interkoneksi antara kegiatan produksi pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya kawasan Agropolitan</li> <li>2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 10 %</li> <li>3) Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB 12 %</li> <li>4) Kontribusi sektor Keu, sewa dan jasa terhadap PDRB 24%</li> </ol>

Prioritas /Tujuan/ Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
5) Penyerapan TK sektor manufaktur dan jasa 43 %	4) Kontribusi Sektor manufaktur terhadap PDRB 12%	dalam arti luas dengan ibu kota kecamatan sebagai terminal pemasaran hasil agribisnis	5) PDRB ADHB Rp 14.764.180 (juta)	
6) PDRB ADHB Rp 1.163.552 (juta)	5) Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB 10 %	3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 10 %	6) PDRB ADHK Rp 9.365.050	
7) PDRB perkapita ADHB Rp 7.528.940	6) PDRB ADHB Rp 2.193.617 (juta)	4) Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB 12 %	7) LPE 4,48 %	
	7) LPE 4,48%	5) Sektor keuangan, persewaan & jasa 21%		
	8) PDRB perkapita Rp 6.833.630	6) Penyerapan TK sektor pertanian 40 %		
	9) Angka pengangguran 7%	7) Penyerapan TK sektor lainnya 60 %		
		8) PDRB ADHB Rp 7.549.606 (juta)		
		9) PDRB Perkapita Rp 7.932.340		
		10) LPE 4,66 %		
		11) Kemiskinan 5 %		
		12) Pengangguran 6 %		

**Misi 4 : Mewujudkan ketersediaan infrastruktur**

Peningkatan pengembangan wilayah dan tata ruang yang disertai kelestarian lingkungan dan sumber daya alam,	1) Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan 2) Penetapan Perda RTRW 3) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana Rantau Baru	1) Pengembangan infrastruktur fasilitas wilayah 2) Tata ruang wilayah dipatuhi sebagai acuan dalam penggunaan ruang	1) Peningkatan infrastruktur fasilitas wilayah (transfortasi, komunikasi dan informasi, listrikl dan air bersih) 2) Terbangun kawasan margasari baru	1) Tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW 2) Infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanfaatan
--	--	--	---	--

Prioritas /Tujuan/ Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
		3) Perencanaan pengembangan kawasan margasari baru	3) Pengembangan kawasan binuang baru	3) Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis (rantau baru, margasari baru, binuang baru)
<b>Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>Good Governance</i>)</b>				
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif - efisien dan memuaskan masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah	1) Pemantapan kelembagaan pemerintah 2) Peningkatan SDM 3) Perbaikan sistem pelayanan publik	1) Sistem pelayanan yang memuaskan 2) Pelayanan perizinan investasi yang baik 3) Implementasi perda yang mendukung investasi	Pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia Pelayanan prima	1) Tingkat kepuasan masyarakat tinggi 2) Standar pelayanan prima (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan administrasi perizinan) 3) SDM dan kelembagaan pemerintah dalam kinerja optimum

## Bab 3

# Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin

### A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan

Penapisan indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Metadata Indikator TPB Edisi 1. Dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 197 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan) sebagaimana disajikan pada **Tabel 5**, sedangkan justifikasi indikator yang tidak relevan disajikan pada **Tabel 6**.

**Tabel 5.** Jumlah Indikator TPB yang Relevan di Kabupaten Tapin

No TPB	Tujuan TPB	Indikator Relevan				Tidak Relevan	Total
		A	B	C	D		
<b>PILAR SOSIAL</b>		<b>65</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>97</b>
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	18	5	0	0	1	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	4	0	1	0	12
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	22	5	7	0	0	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	9	4	0	0	0	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	9	3	2	0	0	14

No TPB	Tujuan TPB	Indikator Relevan				Tidak Relevan	Total
		A	B	C	D		
<b>PILAR EKONOMI</b>		<b>23</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>60</b>
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	0	0	0	2	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	9	2	8	0	0	19
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	3	6	0	0	4	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5	1	1	0	3	10
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	4	4	0	1	16
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>		<b>21</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>43</b>
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	8	4	1	0	5	18
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	5	3	0	0	5	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	4	1	0	0	0	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0	2	0	0	0	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	0	0	0	2	5
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	2	6	0	0	21
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>220 + 1</b>

Keterangan :

A : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018, Perpres No. 59/2017 dan Metadata 1

B : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018, Perpres No. 111/2022 dan Metadata 1

C : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1

D : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018 dan Perpres No. 59/2017 sebagai indikator khas kabupaten

(mengacu Perda KalSel No. 6 tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai salah satu kawasan pertanian dan lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan)

**Tabel 6. Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan di Kabupaten Tapin**

Indikator TPB [Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1]		Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan
<b>PILAR SOSIAL</b>		
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan ketenagalistrikan menjadi kewenangan pusat dan provinsi

Indikator TPB [Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1]		Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan
<b>PILAR EKONOMI</b>		
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pusat dan provinsi
7.3.1*	Intensitas energi primer	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pusat dan provinsi
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Tidak ada jalan tol di Kabupaten Tapin
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Tidak ada jalur kereta api di Kabupaten Tapin
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Tidak ada dermaga penyeberangan di Kabupaten Tapin
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Tidak ada pelabuhan strategis di Kabupaten Tapin
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam 122 Kabupaten 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>		
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kabupaten Tapin tidak termasuk daerah yang terdapat salah satu dari 15 danau prioritas
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kabupaten Tapin tidak berada di dalam wilayah 108 DAS Prioritas Nasional (SK. 328/Menhut-II/2009)
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai & danau	Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Kabupaten Tapin tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kabupaten Tapin tidak termasuk kab./kota di luar Jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sebagai PKN (buku III RPJMN 2015-2019)
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Kabupaten Tapin tidak termasuk kabupaten/kota yang menjadi/memiliki kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Kabupaten Tapin tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Kabupaten Tapin tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan pengelolaan hutan menjadi kewenangan pusat dan provinsi
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Kabupaten Tapin tidak berada di dalam wilayah 108 DAS Prioritas Nasional (SK. 328/Menhut-II/2009)

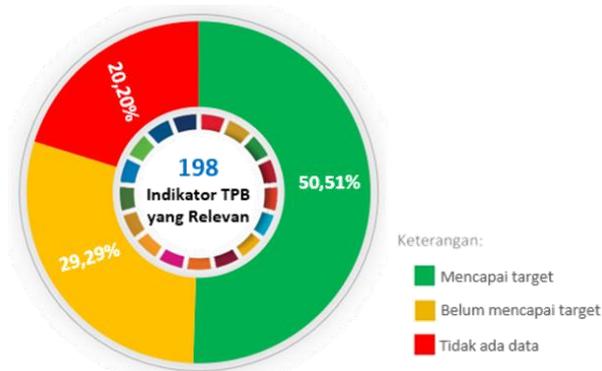
## **B. Analisis Capaian Indikator TPB**

Analisis capaian indikator TPB Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan data capaian indikator TPB tahun 2012-2022 terhadap target sasaran TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, maka target sasaran TPB akan menggunakan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022. Sementara itu, untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 maupun Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, maka capaian indikator TPB ditentukan secara kualitatif.

Pada kajian KLHS ini hasil analisis capaian TPB diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu :

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- 3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)
- 4) Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 198 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 100 indikator TPB (50,51%) mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, 40 indikator TPB (20,20%) tidak/belum ada data dan tidak ada indikator TPB (0%) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (**Gambar 11**).

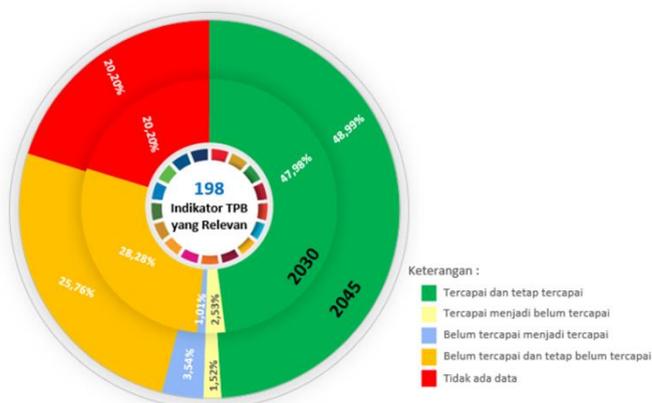


**Gambar 11.** Status Capaian Indikator TPB tahun 2022

### C. Proyeksi Capaian Indikator TPB

Proyeksi capaian masing-masing indikator TPB dilakukan untuk memperkirakan capaian indikator TPB pada tahun 2025-2045. Proyeksi ditentukan berdasarkan baseline data capaian TPB Kabupaten Tapin tahun 2012-2022 dan perhitungan tren pertumbuhannya dengan laju perubahan *business as usual* (BAU) atau laju pertumbuhan umum. Analisis proyeksi capaian indikator TPB Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan data proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 terhadap target sasaran TPB pada Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 atau Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Sementara itu, untuk analisis proyeksi capaian indikator TPB tahun 2045 menggunakan target sasaran TPB pada RPJPN 2025-2045, Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 atau Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya, maka capaian indikator TPB ditentukan secara kualitatif (perlu peningkatan atau perlu penurunan).

Hasil proyeksi capaian indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin pada tahun 2030 menunjukkan bahwa terdapat 97 indikator TPB (48,99%) yang pada tahun 2022 mencapai target dan tetap mencapai target pada tahun 2030, 3 indikator TPB (1,51%) yang pada tahun 2022 mencapai target menjadi belum mencapai target pada tahun 2030, 58 indikator TPB (29,29%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target dan tetap belum mencapai target pada tahun 2030, dan 40 indikator TPB (20,20%) yang pada tahun 2022 dan 2030 tidak/belum ada data (**Gambar 12**).



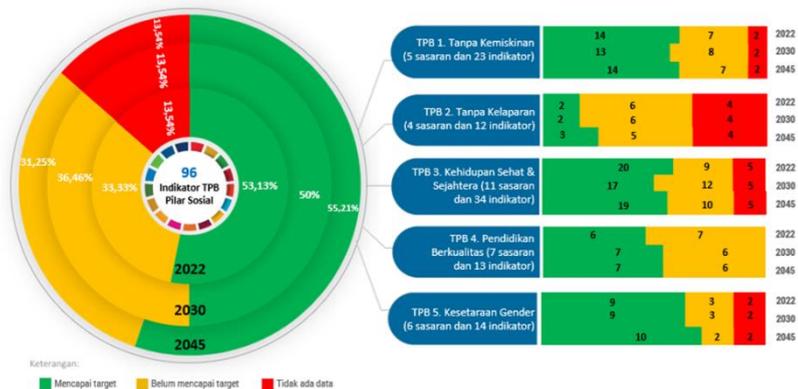
**Gambar 12.** Proyeksi Status Capaian Indikator TPB tahun 2030 dan 2045

Sementara itu, hasil proyeksi capaian indikator TPB tahun 2045 menunjukkan bahwa terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang pada 2022 mencapai target dan tetap mencapai target pada 2045, 4 indikator TPB (2,02%) yang pada 2022 belum mencapai target menjadi mencapai target pada 2045, 54 indikator TPB (27,27%) yang pada 2022 belum mencapai target dan tetap belum mencapai target pada 2045, dan 40 indikator TPB (20,20%) yang pada 2045 tidak/belum ada data.

## D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB

### 1) Pilar Pembangunan Sosial

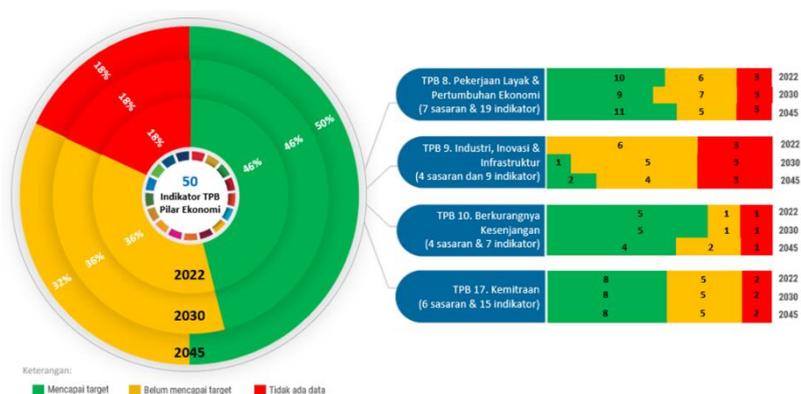
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 51 indikator TPB (53,13%) mencapai target, 32 indikator TPB (33,33%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 48 indikator TPB (50%) mencapai target, 35 indikator TPB (36,46%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 53 indikator TPB (55,21%) mencapai target, 30 indikator TPB (31,25%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 13**.



**Gambar 13.** Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial

## 2) Pilar Pembangunan Ekonomi

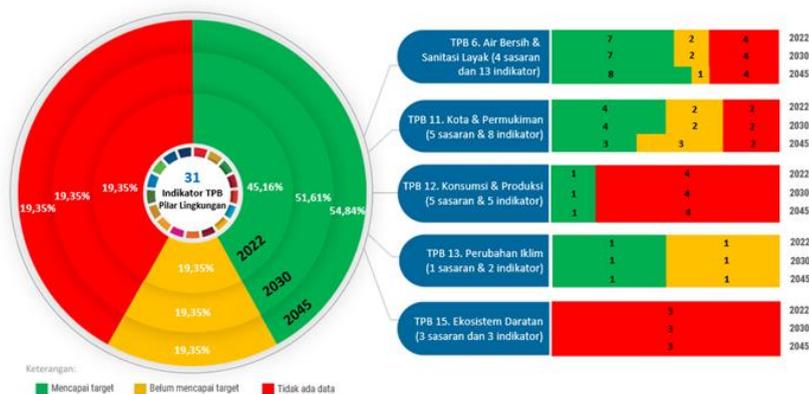
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada 2030 terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 25 indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB (32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada Gambar 14.



**Gambar 14.** Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi

### 3) Pilar Pembangunan Lingkungan

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 13 indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) belum mencapai target dan 13 indikator TPB (41,94%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (41,94%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 15**.

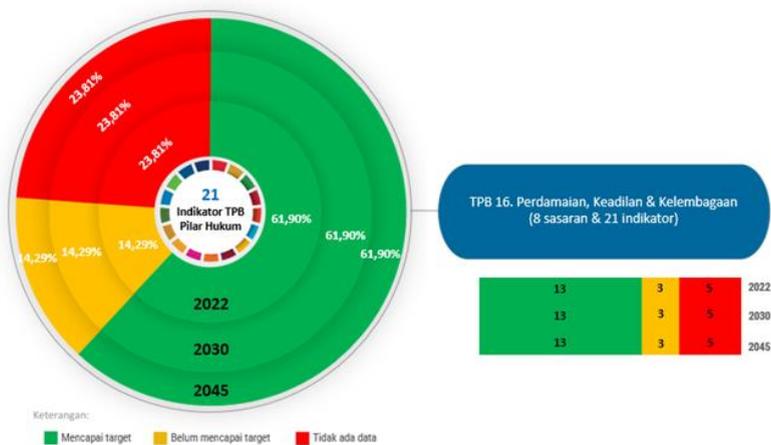


**Gambar 15.** Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan

### 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 5 indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data.

Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 5 indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 16**.

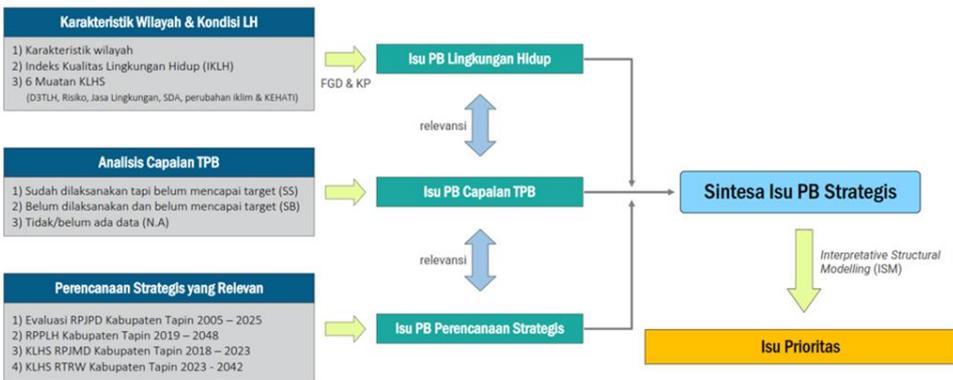


**Gambar 16.** Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

## Bab 4

# Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui proses sintesa isu strategis dari berbagai sumber (**Gambar 17**) untuk menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis. Selanjutnya isu prioritas pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan Teknik Pemodelan Interpretasi Struktural (*Interpretative Structural Modelling/ISM*).



**Gambar 17.** Sintesa Isu Strategis

### A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian indikator TPB mengacu pada hasil proyeksi tahun 2030 dan 2045 (terutama indikator TPB dengan status belum mencapai target [SB], belum dilaksanakan [BB] dan tidak/belum ada data [NA]) yang diinteraksikan dengan 6 muatan

KLHS, karakteristik wilayah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selanjutnya, permasalahan yang mengemuka dikelompokkan sehingga menghasilkan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian TPB, sebagaimana disajikan pada **Tabel 7**.

**Tabel 7.** Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya kasus komplikasi kehamilan</li> <li>• Masih tingginya persalinan non nakes dan di luar faskes</li> <li>• Masih terbatasnya layanan konseling kontrasepsi dan kesehatan reproduksi</li> <li>• Masih terbatasnya layanan konseling UBM (upaya berhenti merokok)</li> <li>• Keterbatasan aksesibilitas wilayah menyebabkan meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan</li> <li>• Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan</li> <li>• Terbatasnya akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan terlatih yang memberikan pelayanan persalinan</li> </ul>	Layanan kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas</li> <li>• Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan target yang ditetapkan</li> <li>• Belum meratanya distribusi tenaga pendidik</li> <li>• Terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah</li> <li>• Terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan menengah</li> </ul>	Layanan pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya infrastruktur jaringan internet</li> <li>• Terbatasnya infrastruktur jaringan mobile broadband</li> <li>• Terbatasnya infrastruktur penunjang industri manufaktur</li> <li>• Terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana Poskesdes untuk pertolongan persalinan</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Pendidikan</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik</li> </ul>	Ketersediaan sarana prasarana/ infrastruktur daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim investasi yang kurang kondusif</li> <li>• Terbatasnya inovasi dan teknologi pengembangan industri manufaktur</li> <li>• Masih terbatasnya produk wisata</li> </ul>	Ketergantungan perekonomian daerah pada pemanfaatan sumber daya lahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pencemaran perairan sumber air baku menyebabkan peningkatan biaya pengolahan air minum</li> </ul>	Pencemaran perairan sumber air baku

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian</li> <li>• Belum dilakukannya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</li> </ul>	Alih fungsi lahan pertanian
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana di Kab. Tapin terutama banjir, kebakaran lahan dan kekeringan, serta potensi risiko bencana gempa bumi</li> <li>• Faktor risiko tinggi terutama karena permukiman penduduk sebagian besar berada pada wilayah rawan bencana</li> <li>• Gagal panen pertanian padi akibat perubahan iklim</li> </ul>	Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk dapat memberikan jaminan sosial sesuai dengan target yang ditetapkan</li> <li>• Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan fasilitas sekolah sesuai dengan target yang ditetapkan</li> <li>• Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan target yang ditetapkan</li> <li>• Dominasi usaha sektor informal yang tidak wajib pajak dan menyebabkan terbatasnya pendapatan daerah dari sektor pajak</li> </ul>	Kemampuan keuangan daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelayanan publik</li> <li>• Masih belum meratanya pemahaman standar pelayanan publik</li> <li>• Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk mendukung sektor industri manufaktur</li> <li>• Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata</li> <li>• Terbatasnya lapangan kerja formal karena dominasi usaha sektor informal dalam perekonomian Kab. Tapin</li> <li>• Terbatasnya lapangan kerja sektor industri manufaktur</li> <li>• Terbatasnya akses informasi tentang sertifikasi pendidik, terutama bagi guru di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten</li> <li>• Keterampilan yang dimiliki angkatan kerja tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor formal</li> <li>• Belum adanya kegiatan pendataan jumlah pekerja industri pariwisata</li> </ul>	Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat (orang tua) tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi anak usia 12-23 bulan</li> <li>• Masih rendahnya pemahaman masyarakat (orang tua) tentang pentingnya kecukupan gizi pada balita</li> <li>• Masih adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap program imunisasi bagi anak usia 12-23 bulan</li> </ul>	Pengetahuan dan daya saing masyarakat

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya penolakan/keengganan sebagian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat (terutama ibu hamil) untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin</li> <li>• Masih adanya kepercayaan di sebagian masyarakat yang turun temurun dan merasa nyaman ditolong oleh DK (Dukun Kampung)</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok</li> <li>• Masih adanya keengganan masyarakat untuk menyekolahkan anak perempuan hingga tingkat pendidikan menengah atau lebih tinggi</li> <li>• Biaya layanan air minum tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat</li> <li>• Biaya layanan sanitasi tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat</li> <li>• Semakin meningkatnya harga hunian layak yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hunian yang layak</li> <li>• Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap standar pelayanan publik</li> <li>• Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak</li> <li>• Harga pangan untuk memenuhi kriteria makanan sehat dan bergizi tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat</li> <li>• Stigma masyarakat terhadap pekerjaan manufaktur sebagai pekerja kasar dan tidak bergengsi</li> <li>• Biaya layanan mobile broadband yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat</li> <li>• Biaya layanan internet yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat</li> <li>• Masih terbatasnya akses literasi digital masyarakat</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdatanya siswa yang bersekolah setingkat SMP pada lembaga pendidikan non formal (terutama Pesantren)</li> <li>• Belum adanya kegiatan pendataan <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan pada setiap kecamatan dan/atau puskesmas</li> <li>• Belum adanya kegiatan skrining/pemeriksaan filariasis pada penduduk di setiap kecamatan</li> <li>• Belum adanya kegiatan pendataan jumlah perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi</li> </ul>	Tata Kelola Pemerintahan

- Belum optimalnya komitmen lintas program dan lintas sektor dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- Belum dilakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
- Belum adanya kegiatan pendataan jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan
- Belum adanya kegiatan pendataan rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air
- Belum ada program insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri
- Belum adanya kegiatan pendataan nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri
- Belum adanya kegiatan pendataan jumlah industri kecil dengan pinjaman atau kredit
- Belum adanya kegiatan pendataan institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan
- Belum dilakukan pendataan jumlah pekerja informal
- Belum terdatanya peserta SJSN – BPJS pekerja informal
- Belum dilakukan pendataan jumlah Perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
- Belum dilakukan pendataan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (RG) dan label ramah lingkungan (LB)
- Belum dilakukan pendataan penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
- Belum dilakukan pendataan tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21
- Belum dilakukan pendataan Jumlah dokumen daftar rencana KPBU (DRK)
- Belum dilakukan pendataan Jumlah proyek skema kerjasama pemerintah & badan usaha
- Belum dilakukan pendataan anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
- Belum dilakukan pendataan jumlah kepemilikan sertifikat PPID
- Belum dilakukan pendataan indikator SDGs terpilih yang relevan
- Belum dilakukan pendataan jumlah rumah tangga terlayani jaringan pitalebar
- Terbatasnya akurasi data peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- Masih rendahnya hasil skrining kebutuhan ber-KB, karena masih kurangnya minat/kunjungan PUS untuk konseling KB

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya hasil skrining korban hukuman fisik dan/atau agresi psikologis, karena adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan</li> <li>• Masih lemahnya sistem pengaduan dan penanganan keluhan Masyarakat</li> <li>• Budaya birokrasi yang lamban dalam pelayanan public</li> <li>• Terbatasnya sistem penagihan pajak</li> <li>• Update perhitungan IRBI Kab. Tapin belum dilakukan secara rutin</li> </ul>	

## **B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis**

### **1) Evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin 2005 - 2025**

Permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan hasil pembangunan daerah
- b. Pembangunan ekonomi sektor unggulan
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan

### **2) RPPLH Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2048**

Isu strategis berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan
- b. Penurunan kuantitas air
- c. Meningkatnya pencemaran air
- d. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, terutama banjir dan kebakaran hutan/lahan
- e. Belum optimalnya pengelolaan sampah
- f. Pencemaran udara

### **3) KLHS RPJMD Kabupaten Tapin 2018 - 2023**

Isu strategis berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Tapin 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan
- b. Kehidupan sehat dan sejahtera
- c. Pendidikan
- d. Pertumbuhan ekonomi
- e. Infrastruktur, industri inklusif dan inovatif
- f. Kota inklusif dan berkelanjutan
- g. Pengelolaan air bersih dan sanitasi
- h. Perubahan iklim dan resiko bencana
- i. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat

### **4) KLHS RTRW Kabupaten Tapin 2023 - 2042**

Isu strategis berdasarkan KLHS RTRW Kabupaten Tapin 2023 – 2042 adalah sebagai berikut :

- a. Konversi lahan dan degradasi sumberdaya alam
- b. Peningkatan bencana
- c. Kualitas dan kuantitas air
- d. Pengembangan agroindustri, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
- e. Sarana dan prasarana
- f. Pengembangan pariwisata
- g. Ketahanan pangan

### **C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik**

Berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023, isu strategis kondisi daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata
- e. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin
- f. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba
- g. Meningkatnya pencemaran air
- h. Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB

#### **D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan**

Sintesa isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggabungkan dan mengelompokkan isu strategis berdasarkan capaian TPB, kondisi 6 muatan KLHS, dokumen perencanaan terkait dan hasil konsultasi publik sebagaimana disajikan pada **Tabel 8**.

**Tabel 8. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin**

Isu PB Berdasarkan Capaian TPB	Isu PB Berdasarkan Perencanaan yang Relevan				Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik	Sifat Isu		Pengelompokan Isu PB	TPB yang Relevan
	Evaluasi RPJPD 2005-2025	RPPLH 2019 – 2048	KLHS RPJMD 2018 – 2023	KLHS RTRW 2023 – 2042		Dampak	Akar Masalah		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan keuangan daerah</li> <li>Tata Kelola Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Kelola Pemerintahan</li> </ul>	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB</li> </ul>	-	√	Tata Kelola Pemerintahan	1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17
<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Kesehatan</li> <li>Layanan Pendidikan</li> <li>Ketersediaan sarana prasarana/ infrastruktur daerah</li> <li>Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan</li> <li>Pengetahuan dan daya saing masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan air bersih</li> <li>Ketahanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan</li> <li>Kesehatan</li> <li>Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pangan</li> <li>Pendidikan berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya rata-rata lama sekolah</li> <li>Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah</li> <li>Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba</li> </ul>	-	√	Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim</li> </ul>	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi</li> <li>Meningkatnya kejadian gagal panen</li> </ul>	-	√	Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim	1, 11, 13
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alih fungsi lahan pertanian</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alih fungsi lahan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya alih fungsi lahan</li> </ul>	-	√	Alih fungsi lahan	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketergantungan perekonomian daerah pada pemanfaatan sumber daya lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perekonomian</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan, industri, jasa dan pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan UMKM</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata</li> </ul>	-	√	Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau	8, 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencemaran perairan sumber air baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kualitas air sungai</li> <li>Penurunan kualitas udara</li> <li>Pengelolaan sampah</li> <li>Kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)</li> <li>Sanitasi (sampah dan limbah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutupan lahan</li> <li>Tata air</li> <li>Kesesuaian lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pencemaran air</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3</li> </ul>	√	-	-	-

Berdasarkan **Tabel 8** tersebut diperoleh 5 isu PB strategis di Kabupaten Tapin, yaitu:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- 3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- 4) Alih fungsi lahan
- 5) Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau

#### **E. Analisis Isu Prioritas**

Analisis isu prioritas pembangunan Kabupaten Tapin 2025-2045 dilakukan dengan Teknik Pemodelan Interpretasi Struktural (*Interpretative Structural Modelling-ISM*). ISM merupakan suatu teknik pemodelan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar elemen dalam suatu sistem dan memecahkannya dalam bentuk grafik berdasarkan tingkat hierarki elemen.

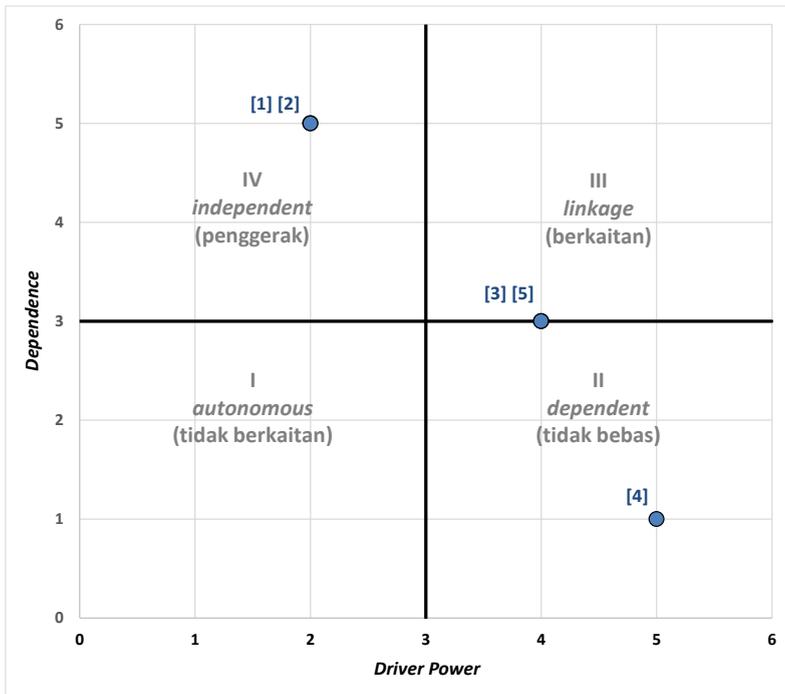
Data analisis ISM berdasarkan pendapat 20 responden yang merupakan anggota Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan input isu PB strategis sebagai berikut :

- E1 : Tata Kelola Pemerintahan
- E2 : Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- E3 : Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- E4 : Alih fungsi lahan
- E5 : Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

Hasil analisis ISM terhadap elemen isu PB strategis disajikan pada **Tabel 9**, sedangkan kedudukan setiap sub-elemen isu PB strategis disajikan pada **Gambar 18**.

**Tabel 9.** *Reachability Matrix Final* Sub Elemen Isu PB Strategis

Sub Elemen	1	2	3	4	5	Driver Power	Ranks
E1	1	1	1	1	1	5	1
E2	1	1	1	1	1	5	1
E3	0	0	1	1	1	3	2
E4	0	0	0	1	0	1	3
E5	0	0	1	1	1	3	2
<i>Depedence</i>	2	2	4	5	4		
<i>Level</i>	3	3	2	1	2		



**Gambar 18.** Kedudukan Setiap Sub Elemen Isu PB strategis

Berdasarkan hasil analisis ISM diketahui bahwa isu prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tapin 2025 – 2045 adalah :

- 1) Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- 3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- 4) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau
- 5) Alih fungsi lahan

Pada **Gambar 18**, dua sub elemen kunci isu PB strategis Kabupaten Tapin yaitu E1 (tata kelola pemerintahan) dan E2 (pelayanan dasar dan sumberdaya manusia) terletak pada kuadran IV (independent). Kedua sub elemen kunci tersebut mempunyai nilai penggerak yang tertinggi dan nilai ketergantungan sangat rendah. Kondisi ini dapat diartikan bahwa apabila tata kelola pemerintahan, serta pelayanan dasar dan sumberdaya manusia ditingkatkan, maka keduanya menjadi penggerak positif atau akan meningkatkan kualitas 2 sub elemen di kuadran III (linkage) yaitu: E3 (ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim) dan E5 (Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau). Sementara itu, dua sub elemen di kuadran III merupakan penghubung antara 2 sub elemen di kuadran IV dengan 1 sub elemen di kuadran II. Kondisi ini dapat diartikan bahwa perbaikan/peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau dapat mengurangi alih fungsi lahan (E4).

## Bab 5

# Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 mengacu pada hasil analisis capaian indikator TPB tahun 2022, proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 dan tahun 2045, serta hasil identifikasi permasalahan masing-masing indikator TPB yang telah dianalisis.

### A. Tanpa Upaya Tambahan

Skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB telah mencapai atau melampaui target yang ditentukan, dan selanjutnya pencapaian indikator TPB dilakukan dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (*business as usual*).

### B. Dengan Upaya Tambahan

Skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB belum mencapai target yang ditentukan dan untuk indikator TPB yang belum/tidak ada data. Skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario optimis dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan mencapai target pada tahun 2030, sedangkan skenario moderat dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan mencapai target pada tahun 2045.

Tabel 10. Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>PILAR SOSIAL</b>														
<b>TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>														
Target TPB	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan													
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat menjadi 17,12% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 17,12% (Perpres 59/2017)	96,12%	96,15%	96,20%	96,25%	96,30%	96,35%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos	Meningkatnya pemenuhan hak dasar & inklusi vitas penyandang disabilitas pada tahun 2045 menjadi 17,12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas;</li> <li>• peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan inklusif;</li> <li>• pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan;</li> <li>• perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan;</li> <li>• peningkatan teknologi informasi;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurun (Perpres 59/2017)	Menurun (Perpres 59/2017)	3.020	2.870	2.620	2.370	2.120	1.870	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos	Menurunnya jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan akses dan kualitas pendidikan;</li> <li>• penguatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan;</li> <li>• peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro													
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di faskes	Meningkat menjadi 95% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 95% (Perpres 111/2022)	76,91%	79,46%	83,71%	87,96%	92,21%	96,46%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya cakupan persalinan di faskes pada tahun 2045 menjadi 95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes;</li> <li>• penguatan sistem rujukan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 65% (Perpres 59/2017)	74,87%	83,54%	85,67%	87,65%	89,50%	91,65%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada PUS pada tahun 2045 menjadi 65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 90% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 70% (RPIPN 2025-2045)	87,60%	88,20%	89,20%	90,20%	91,20%	92,20%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPR	Meningkatnya akses sanitasi layak pada tahun 2045 menjadi 70%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 94,78% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 70% (Perpres 59/2017)	99,38%	99,41%	99,46%	99,51%	99,56%	99,61%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya APM SD/MI/ Sederajat pada tahun 2045 menjadi 94,78%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;</li> <li>• peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,40% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 77,40% (Perpres 59/2017)	97,52%	97,82%	98,32%	98,82%	99,32%	99,82%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdukcapil	Meningkatnya kepemilikan akte lahir untuk pada tahun 2045 menjadi 77,40%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan catatan sipil;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB					OPD	Rekomendasi				
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045		Sasaran	Arah Kebijakan			
Target TPB	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana													
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	25	25	25	25	25	25	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• pengembangan infrastruktur tahan bencana;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Terpenuhi (Perpres 59/2017)	Terpenuhi (Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• penyediaan bantuan kebutuhan dasar;</li> <li>• penyediaan pelayanan kesehatan dan psikososial;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksana (Perpres 59/2017)	Terlaksana (Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• penyediaan bantuan kebutuhan dasar;</li> <li>• penyediaan pelayanan kesehatan dan psikososial;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB: Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	0	1	2	3	4	5	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan khusus;</li> <li>• pengembangan kurikulum dan kapasitas guru;</li> <li>• dukungan pelayanan kesehatan dan psikososial;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Menurunnya indeks risiko bencana menjadi 118,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• pengembangan infrastruktur tahan bencana;</li> <li>• peningkatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB							OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi													
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemerantasan kemiskinan	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	0,44%	0,59%	0,84%	1,09%	1,34%	1,59%	Mencapai Target	Mencapai Target	BKAD	Meningkatnya alokasi sumber daya untuk program pemerantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB 2. Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>														
Target TPB	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula													
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	Menurun menjadi 17% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 17% (Perpres 59/2017)	7,85%	7,49%	6,89%	6,29%	5,69%	5,09%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) balita pada tahun 2045 menjadi 17%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi;</li> <li>• peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 50% (Perpres 59/2017)	66,49%	67,18%	68,33%	69,48%	70,63%	71,78%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya persentase bayi < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian													
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)	50,28	53,91	59,96	66,01	72,06	78,11	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Diperta	Meningkatnya nilai tambah pertanian pada tahun 2045 menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• pengembangan infrastruktur pertanian;</li> <li>• penguatan kapasitas petani;</li> <li>• diversifikasi produksi pertanian;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>														
Target TPB	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup													
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 95% (Perpres 59/2017)	90,68%	91,28%	92,28%	93,28%	94,28%	95,28%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan terampil pada tahun 2045 menjadi 95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan (terutama pelayanan maternal);</li> <li>• peningkatan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan; oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2045 menjadi 95%</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 95% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 95% (Perpres 111/2022)	76,91%	79,46%	83,71%	87,96%	92,21%	96,46%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya persentase persalinan di faskes pada tahun 2045 menjadi 95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes;</li> <li>• penguatan sistem rujukan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	Sasaran		Arah Kebijakan			
Target TPB	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000													
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 18,8 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 18,8 (Roadmap SDGs 2030)	13	13	12	11	11	10	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBa) pada tahun 2045 menjadi 18,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;</li> <li>• penguatan pencegahan dan penuluhan penyakit menular;</li> <li>• peningkatan akses air bersih dan sanitasi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 7,0 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 7,0 (Roadmap SDGs 2030)	8	8	7	6	5	5	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Neonatal (AKN) pada tahun 2045 menjadi 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;</li> <li>• penguatan pencegahan dan penuluhan penyakit menular;</li> <li>• peningkatan akses air bersih dan sanitasi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 12 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 12 (Roadmap SDGs 2030)	12	12	11	10	9	9	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2045 menjadi 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;</li> <li>• penguatan pencegahan dan penuluhan penyakit menular;</li> <li>• peningkatan akses air bersih dan sanitasi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Status imunisasi dasar lengkap pada bayi (Perpres 59/2017)	Status imunisasi dasar lengkap pada bayi (Perpres 59/2017)	79,50%	79,80%	80,30%	80,80%	81,30%	81,80%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Tercapainya minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan distribusi vaksin;</li> <li>• peningkatan kualitas pelayanan imunisasi;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bursamer air, serta penyakit menular lainnya													
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi < 0,5% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi < 0,5% (Perpres 59/2017)	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2045 menjadi < 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan, pengujian dan penyaringan penularan HIV;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Status Eliminasi Malaria (Roadmap SDGs 2030)	Status Eliminasi Malaria (Roadmap SDGs 2030)	Belum Eliminasi Malaria	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Tercapainya status Eliminasi Malaria pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan program pengendalian dan surveilans Malaria;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• keberlanjutan dan pemantauan pasca-eliminasi;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>					
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Status Pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Status Pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Terlaksananya deteksi dini untuk infeksi Hepa titis B pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan akses dan ketersediaan tes Hepatitis B;</li> <li>• peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Status pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Status pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	F = 6 K = 15	F = 6; K = 23	F = 7; K = 36	F = 8; K = 49	F = 9; K = 62	F = 10; K = 75	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Terlaksananya pendataan jumlah orang yang memerlukan intervensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• survey dan pemetaan epidemiologi;</li> <li>• penguatan sistem pemantauan dan pelaporan;</li> <li>• peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	Sasaran			Arah Kebijakan		
Target TPB	3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan													
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	13	14	15	16	17	18	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional													
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkat menjadi 64,55% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 64,55% (Roadmap SDGs 2030)	74,87%	78,04%	84,07%	90,95%	91,61%	92,37%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi metode modern pada tahun 2045 menjadi 64,55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 65% (Perpres 59/2017)	74,87%	83,54%	85,67%	87,65%	89,50%	91,65%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi semua cara pada tahun 2045 menjadi 65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	23	22,00	21,00	20,00	19,00	18,00	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Menurunnya angka ASFR pada tahun 2045 menjadi 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,1 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 2,1 (Roadmap SDGs 2030)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Menurunnya angka TFR pada tahun 2045 menjadi 2,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang													
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat (Perpres 111/22)	Meningkat (Perpres 111/22)	974	175.075	185.824	195.697	206.851	217.685	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos	Meningkatnya cakupan asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;</li> <li>• penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah													
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	tidak ada kasus	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Menurunnya proporsi kematian akibat keracunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan regulasi dan pengawasan;</li> <li>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>				
Target TPB	3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang mengagaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua													
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat menjadi 96% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 96% (Perpres 111/2022)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2045 menjadi 96%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan regulasi dan pengawasan;</li> <li>• peningkatan manajemen rantai pasokan;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil													
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat (Perpres 111/22)	Meningkat (Perpres 111/22)	3,09	3,29	3,56	3,82	4,04	4,24	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meratanya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan regulasi dan pengawasan;</li> <li>• pengembangan karir dan kesejahteraan tenaga kesehatan;</li> <li>• penguatan infrastruktur kesehatan;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB</b>	<b>4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>													
Target TPB	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif													
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	4 SD (AKSI) meningkat menjadi: 67,2% (L); 35,5% (N) & 9 SMP (PISA) meningkat menjadi: 50% (L); 38% (N) (Roadmap SDGs 2030)	Meningkatnya rata-rata nilai PISA pada tahun 2045 menjadi 485 (membaca), 490 (matematika) dan 487 (sains) (RPJPN 2025-2045)	SD : 59,65% (L); 41,02% (N) SMP : 67,93% (L); 42,10% (N)	SD : 62,91% (L); 41,64% (N) SMP : 68,69% (L); 42,45% (N)	SD : 68,33% (L); 42,67% (N) SMP : 69,97% (L); 43,03% (N)	SD : 73,76% (L); 43,71% (N) SMP : 71,24% (L); 43,62% (N)	SD : 79,18% (L); 44,74% (N) SMP : 72,51% (L); 44,20% (N)	SD : 84,61% (L); 45,77% (N) SMP : 73,79% (L); 44,79% (N)	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya rata-rata nilai PISA pada tahun 2045 menjadi 485 (membaca), 490 (matematika) dan 487 (sains)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan infrastruktur dan sumber daya pendidikan;</li> <li>• peningkatan kualitas guru;</li> <li>• pelibatan orang tua dan komunitas;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 81% (Perpres 59/2017)	95,12%	97,56%	97,62%	97,67%	97,73%	97,78%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya persen-tase SMP/MTs berakre-ditasi minimal B pada tahun 2045 menjadi 81%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah;</li> <li>• peningkatan kualitas guru;</li> <li>• penguatan manajemen sekolah;</li> <li>• peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• pelibatan orang tua dan komunitas;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar													
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)	46,58%	51,08%	58,58%	66,08%	73,58%	81,08%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya APK PAUD pada tahun 2045 menjadi 65,51%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;</li> <li>• peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan													
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	85,47%	86,49%	88,19%	89,89%	91,59%	93,29%	Mencapai Target	Mencapai Target	Diskominfo	Meningkatnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan infrastruktur dan akses TIK;</li> <li>• pendidikan dan pelatihan TIK untuk masyarakat;</li> <li>• integrasi TIK dalam kurikulum pendidikan;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi													
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 96,1% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 96,1% (Perpres 59/2017)	98,69%	98,78%	98,93%	99,08%	99,23%	99,38%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2045 menjadi 96,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan pendidikan dasar dan program literasi;</li> <li>• peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pengajar;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	MA24 : 100% MA59 : 97,38%	MA24 : 100% MA59 : 97,47%	MA24 : 100% MA59 : 97,62%	MA24 : 100% MA59 : 97,77%	MA24 : 100% MA59 : 97,92%	MA24 : 100% MA59 : 98,07%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya persen-tase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan pendidikan dasar dan program literasi;</li> <li>• peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pengajar;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua													
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) inter-net untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air mi-num layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	28,57%	7 jenis sarpras terdata	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya proporsi sekolah dengan penyediaan akses sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investasi infrastruktur dan sarana pendidikan;</li> <li>• peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>				
<b>TPB 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>														
Target TPB	5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya													
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Menurunnya proporsi Perempuan dan anak perempuan yg mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka dan penegakan hukum;</li> <li>• pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;</li> <li>• perlindungan khusus bagi anak perempuan;</li> <li>• peningkatan layanan dukungan korban kekerasan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi < 20,48% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi < 20,48% (Perpres 59/2017)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Menurunnya prevalensi kekerasan terha-dap anak perempuan pada tahun 2045 menjadi < 20,48%	<ul style="list-style-type: none"> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun (Perpres 111/2022)	Menurun (Perpres 111/2022)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Menurunnya prevalensi kekerasan terha-dap perempuan usia 15-64 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan kerangka dan penegakan hukum;</li> <li>perberdayaan perempuan dan anak perempuan;</li> <li>perlindungan khusus bagi anak perempuan;</li> <li>peningkatan layanan dukungan korban kekerasan;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 70% (Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat laya-nan komprehensif pd. 2045 menjadi 70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan sistem layanan dukungan korban kekerasan;</li> <li>perberdayaan ekonomi dan sosial;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan														
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan 18 tahun.	Menurun menjadi 6,94% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 6,94% (Roadmap SDGs 2030)	0,82%	0,81%	0,78%	0,76%	0,73%	0,70%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 6,94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan akses terhadap pendidikan &amp; layanan kesehatan;</li> <li>perberdayaan perempuan;</li> <li>pelibatan tokoh masyarakat dan agama;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	23	22	21	20	19	18	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Menurunnya angka ASFR pada tahun 2045 menjadi 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>peningkatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat														
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	16%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Meningkatnya keter-wakilan perempuan di DPRD Kab/Kota pada 2045 menjadi 17%	<ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan kuota gender;</li> <li>pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan;</li> <li>peningkatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managenial.	Eselon II meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	Eselon II meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Meningkatnya keterwakilan perempuan berkedudukan Eselon II pada 2045 menjadi 16,39%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan kuota gender;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut													
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemaha-man Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 85% (Perpres 59/2017)	75%	83%	84%	85%	86%	87%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	DP2KB	Meningkatnya penge-tahuan dan pemaha-man PUS tentang metode kontrasepsi modern pada tahun 2045 menjadi 85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses, ketersediaan dan kualitas layanan Kb;</li> <li>• pelibatan pria dalam kb; pelibatan tokoh masyarakat dan agama;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan													
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	75,52%	78,18%	82,63%	87,07%	91,51%	95,95%	Mencapai Target	Mencapai Target	Diskominfo	Meningkatnya proporsi individu yang mengua-sai/ memiliki telepon genggam pada tahun 2045 menjadi 75,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kebijakan dan regulasi pendukung;</li> <li>• peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan;</li> <li>• peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas perangkat;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>PILAR EKONOMI</b>														
TPB	<b>8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>													
Target TPB	8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang													
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)	3,41%	3,77%	4,38%	4,98%	5,59%	6,19%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Bappelitbang	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per kapita pada tahun 2045 menjadi 5,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi;</li> <li>• peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian;</li> <li>• peningkatan investasi;</li> <li>• peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>• pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;</li> <li>• peningkatan efisiensi dan produktivitas;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya													
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat menjadi 3,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 3,7% (Perpres 111/2022)	3,13%	3,49%	4,09%	4,69%	5,29%	5,89%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappelitbang	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja pada 2045 menjadi 3,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi;</li> <li>• penguatan sektor industri dan pertanian;</li> <li>• peningkatan investasi;</li> <li>• peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>• pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;</li> <li>• peningkatan efisiensi dan produktivitas;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan														
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Meningkat menjadi 51% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 51% (Perpres 59/2017)	30,37%	36,81%	46,66%	55,40%	63,20%	70,21%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Disnaker	Meningkatnya persen-tase tenaga kerja formal pada tahun 2045 menjadi 51%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja;</li> <li>• peningkatan perlindungan tenaga kerja;</li> <li>• peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;</li> <li>• peningkatan produktivitas dan daya saing;</li> <li>• pengembangan infrastruktur ekonomi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya														
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	18.165	20.175	23.525	26.875	30.225	33.575	Mencapai Target	Mencapai Target	Disnaker	Meningkatnya upah rata-rata per jam pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>• pengembangan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan;</li> <li>• penguatan kelembagaan dan jaringan;</li> <li>• pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;</li> <li>• peningkatan efisiensi dan produktivitas;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	42,74%	40,55%	36,90%	33,25%	29,60%	25,95%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disnaker	Menurunnya tingkat setengah pengang-guran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>• penciptaan lapangan kerja;</li> <li>• pengembangan pasar tenaga kerja; d</li> <li>• ukungan untuk kewirausahaan;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal														
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	19	150	400	650	900	1150	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudpar	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan destinasi pariwisata;</li> <li>• pengembangan produk wisata;</li> <li>• peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata;</li> <li>• penguatan pemasaran dan promosi;</li> <li>• pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	1.727.390	2.114.240	2.758.990	3.403.740	4.048.490	4.693.240	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudpar	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan destinasi &amp; produk wisata;</li> <li>• peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata;</li> <li>• penguatan pemasaran dan promosi;</li> <li>• pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (RPJPN 2025-2045)	242.550	264.854	307.564	345.772	379.475	408.675	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudpar	Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan destinasi pariwisata;</li> <li>• pengembangan produk wisata;</li> <li>• penguatan pemasaran dan promosi;</li> <li>• pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	0,20%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudpar	Meningkatnya proporsi pekerja industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan produk wisata;</li> <li>• peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata;</li> <li>• penguatan pemasaran dan promosi;</li> <li>• pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua														
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	21,58	22,58	23,58	24,58	25,58	26,58	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya jumlah kantor bank dan ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur keuangan;</li> <li>• kerjasama dengan bank;</li> <li>• edukasi dan literasi keuangan;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Menurunnya rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur keuangan;</li> <li>• kerjasama dengan bank;</li> <li>• edukasi dan literasi keuangan;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</b>														
Target TPB 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang														
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)	14,31%	15,21%	16,71%	18,21%	19,71%	21,21%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Disnaker	Meningkatnya proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur pada 2045 menjadi 17,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja;</li> <li>• peningkatan perlindungan tenaga kerja;</li> <li>• peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;</li> <li>• peningkatan produktivitas dan daya saing;</li> <li>• pengembangan infrastruktur ekonomi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020														
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	75,52%	78,18%	82,63%	87,07%	91,51%	95,95%	Mencapai Target	Mencapai Target	Diskominfo	Meningkatnya individu yang memiliki telepon genggam pada 2045 menjadi 75,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kebijakan dan regulasi pendukung;</li> <li>• peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi;</li> <li>• peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas perangkat;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara</b>														
Target TPB 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional														
10.1.1*	Koefisien Gini	Menurun menjadi 0,363 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 0,379 (RPJPN 2025-2045)	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappeltbang	Menurunnya Koefisien Gini pada 2045 menjadi 0,379	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan pemerataan pembangunan;</li> <li>• pengembangan ekonomi dan kewirausahaan;</li> <li>• kebijakan perumahan dan infrastruktur;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022		Proyeksi Capaian TPB					OPD	Sasaran	Rekomendasi		
	2030	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045			Arah Kebijakan		
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun (Perpres 111/2022)	Menurun (Perpres 111/2022)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	DPMD	Menurunnya jumlah desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar;</li> <li>• kebijakan pemerataan pembangunan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	3	5	7	9	11	13	Mencapai Target	Mencapai Target	DPMD	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar;</li> <li>• kebijakan pemerataan pembangunan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut													
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappelitbang	Menurunnya jumlah kebijakan yang diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peninjauan kebijakan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
TPB	17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan													
Target TPB	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya													
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	1,40%	1,82%	2,52%	3,22%	3,92%	4,62%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bapenda	Meningkatnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi;</li> <li>• peningkatan akses ekonomi;</li> <li>• penguatan sektor industri dan pertanian;</li> <li>• peningkatan investasi;</li> <li>• peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>• pemberdayaan umk dan ekonomi kreatif;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama													
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek (Perpres 59/2017)	Jumlah proyek (Perpres 59/2017)	128	128	128	128	128	128	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah dokumen (Perpres 59/2017)	Jumlah dokumen (Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya jumlah dokumen KPBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terlihat berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional													
17.18.1.(a)	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	98,86%	98,95%	99,10%	99,25%	99,40%	99,55%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan data yang akurat dan terkini;</li> <li>• peningkatan kualitas data;</li> <li>• transparansi dan keterbukaan;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi					
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan			
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	96,88%	96,99%	97,18%	97,36%	97,55%	97,73%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• penyediaan data yang akurat dan terkini;</li> <li>• peningkatan kualitas data;</li> <li>• transparansi dan keterbukaan;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>		
Target TPB	17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang															
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia (Perpres 111/2022)	Tersedia (Perpres 111/2022)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Mencapai Target	Mencapai Target	Disudkcapil	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kebijakan dan regulasi pendukung;</li> <li>• peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• penyediaan data yang akurat dan terkini;</li> <li>• peningkatan kualitas data;</li> <li>• transparansi dan keterbukaan;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	19.481	20.450	22.065	23.680	25.295	26.910	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan data yang akurat dan terkini;</li> <li>• peningkatan kualitas data;</li> <li>• transparansi dan keterbukaan;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>		
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan data yang akurat dan terkini;</li> <li>• peningkatan kualitas data;</li> <li>• transparansi dan keterbukaan;</li> <li>• peningkatan literasi digital;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>																
TPB	6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua															
Target TPB	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua															
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	372	372	372	372	372	372	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPR	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investasi dalam infrastruktur air baku;</li> <li>• pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;</li> <li>• peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>		
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 15% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 15% (Perpres 111/2022)	51,04%	51,64%	52,64%	53,64%	54,64%	55,64%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disperkimtan	Meningkatnya akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada 2045 menjadi 15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan infrastruktur air minum;</li> <li>• perlindungan sumber daya air;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>		

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan													
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	135	135	135	135	135	135	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur sanitasi;</li> <li>• penguatan kapasitas dan kelembagaan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	135	135	135	135	135	135	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan SBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur sanitasi;</li> <li>• penguatan kapasitas dan kelembagaan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPR	Meningkatnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur sanitasi;</li> <li>• penguatan kapasitas dan kelembagaan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global													
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPR	Meningkatnya kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur sanitasi;</li> <li>• penguatan kapasitas dan kelembagaan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat menjadi 55,5 (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 55,5 (Perpres 111/2022)	56,84	58,09	59,34	60,59	61,84	63,09	Mencapai Target	Mencapai Target	DLH	Meningkatnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku pada 2045 menjadi 55,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengelolaan air limbah perkotaan;</li> <li>• konservasi dan restorasi ekosistem sungai;</li> <li>• penguatan kapasitas dan kelembagaan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB</b>	<b>11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>													
Target TPB	11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan													
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Menurunnya indeks risiko bencana menjadi 118,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan risiko dan zonasi wilayah;</li> <li>• pengembangan infrastruktur tahan bencana;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedia (Perpres 59/2017)	Tersedia (Perpres 59/2017)	1	2	3	4	5	5	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur teknologi;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	Sasaran		Arah Kebijakan			
Target TPB	11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030													
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penguatan kapasitas lembaga lokal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB</b>	<b>12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>													
Target TPB	12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam													
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	36	38	40	42	44	46	Mencapai Target	Mencapai Target	DLH	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• pemberian insentif dan dukungan teknis;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>TPB</b>	<b>13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>													
Target TPB	13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara													
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>														
<b>TPB</b>	<b>16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat</b>													
Target TPB	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun													
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Menurunnya kematian akibat konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan konflik sosial;</li> <li>• peningkatan keamanan dan pengawasan;</li> <li>• penguatan dan penegakan hukum;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Menurunnya penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan kriminalitas;</li> <li>• peningkatan keamanan dan pengawasan;</li> <li>• penguatan dan penegakan hukum;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak													
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	P : 20,48% L : 38,62% (Perpres 59/2017)	P : 20,48% L : 38,62% (Perpres 59/2017)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Menurunnya prevalensi kekerasan pada tahun 2045 terhadap anak laki-laki menjadi 20,48% dan anak Perempuan menjadi 38,62%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka dan penegakan hukum;</li> <li>• pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;</li> <li>• perlindungan khusus bagi anak perempuan;</li> <li>• peningkatan layanan dukungan korban kekerasan;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat													
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Perlu peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu peningkatan (Sifat indikator TPB)	90,78%	91,14%	91,74%	92,34%	92,94%	93,54%	Mencapai Target	Mencapai Target	BKAD	Meningkatnya proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• penetapan prioritas anggaran;</li> <li>• peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran;</li> <li>• integrasi program pembangunan daerah;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KL/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi 60% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 60% (Perpres 59/2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mencapai Target	Mencapai Target	Inspektorat	Meningkatnya WTP atas laporan keuangan pada tahun 2045 menjadi 60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• transparansi dan akuntabilitas;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>• pemberian penghargaan dan dukungan teknis;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) KL/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi 80% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 80% (Perpres 111/2022)	B	B	B	B	B	B	Mencapai Target	Mencapai Target	Inspektorat	Meningkatnya nilai SAKIP pada tahun 2045 menjadi 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• transparansi dan akuntabilitas;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>• pemberian penghargaan dan dukungan teknis;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan pada tahun 2045 menjadi 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik KL/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi 70% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 70% (Perpres 111/2022)	CC	B	B	B	B	B	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya instansi pemerintah yang memiliki nilai IRB Baik pada tahun 2045 menjadi 70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• transparansi dan akuntabilitas;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	A-	A-	A-	A-	A-	A-	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya kepa-tuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik pada 2045 menjadi 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi;</li> <li>• transparansi dan akuntabilitas;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>• pemberian penghargaan dan dukungan teknis;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
Target TPB	16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan													
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	16%	20%	20%	20%	20%	20%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kab/Kota pada 2045 menjadi 17%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan kuota gender;</li> <li>• pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan;</li> <li>• penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>• peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>• penggunaan teknologi informasi;</li> <li>• kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>• peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Sasaran	Rekomendasi	
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030			2045	Arah Kebijakan
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	21,62%	Mencapai Target	Mencapai Target	DP3A	Meningkatnya keterwakilan perempuan berkedudukan Eselon II pada 2045 menjadi 16,39%	<ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan kuota gender;</li> <li>pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan;</li> <li>penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>Target TPB</b>	16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran												
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 77,4% (Perpres 59/2017)	87,61%	88,09%	88,89%	89,69%	90,49%	91,29%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disudkcapil	Meningkatnya persentase kepemilikan akta lahir pada tahun 2045 menjadi 77,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan akses &amp; infrastruktur pelayanan pencatatan sipil;</li> <li>peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>
<b>Target TPB</b>	16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan												
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappellitbang	Menurunnya jumlah kebijakan yang diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>peninjauan kebijakan;</li> <li>penggunaan teknologi informasi;</li> <li>kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ul>

**Tabel 11.** Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum/Tidak Ada Data

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>PILAR SOSIAL</b>						
<b>TPB</b>	<b>1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>					
Target TPB	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana					
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Maksimal 0,10% PDB (Perpres 111/2022)	Maksimal 0,11% PDB (RPJPN 2025-2045)	BPBD	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana maksimal sebesar 0,11%	Melakukan pendataan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Target TPB	1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi					
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan; kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	BKAD	Meningkatnya pengeluaran untuk layanan pokok dari total belanja pemerintah	Melakukan pendataan pengeluaran untuk layanan pokok sebagai persentase dari total belanja pemerintah
<b>TPB</b>	<b>2. Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>					
Target TPB	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment-PoU</i> )	Menurun menjadi 3,6% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 2,10% (RPJPN 2025-2045)	DKP	Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2045 menjadi 2,10%	Melakukan pendataan prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun menjadi 4% (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 4% (Perpres 111/2022)	DKP	Menurunnya preva-lensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat pada tahun 2045 menjadi 4%	Melakukan pendataan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 8,5% (Perpres 59/2017)	DKPP	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/ kapita/hari pada tahun 2045 menjadi 8,5%.	Melakukan pendataan penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/kapita/hari
Target TPB	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	Dinkes	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) baduta pada tahun 2045 menjadi 28%	Melakukan pendataan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>TPB</b>	<b>3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>					
Target TPB	3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 7,5% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 7,5% (Roadmap SDGs 2030)	Dinkes	Menurunnya persentase perokok usia 10-18 tahun pada tahun 2045 menjadi 7,5%	Melakukan pendataan persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun menjadi 21,8% (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 21,8% (Perpres 111/2022)	Dinkes	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2045 menjadi ≤ 21,8%	Melakukan pendataan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Bakesbangpol	Tidak meningkatnya angka kematian akibat bunuh diri	Melakukan pendataan angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
Target TPB	3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan					
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Bakesbangpol	Menurunnya konsumsi alkohol (liter/kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun	Melakukan pendataan konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir
Target TPB	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 9,91% (Perpres 59/2017)	Dinkes	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2045 menjadi 9,91%.	Melakukan pendataan unmet need pelayanan kesehatan
<b>TPB</b>	<b>5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>					
Target TPB	5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	DP3A	Meningkatnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Melakukan pendataan jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
Target TPB	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut					
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	DP2KB	Meningkatnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Melakukan pendataan perempuan 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>PILAR EKONOMI</b>						
<b>TPB</b>	<b>8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>					
Target TPB	8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan					
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Meningkat menjadi 30,8% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 30,8% (Perpres 111/2022)	Disperin	Meningkatnya persentase akses UMKM ke layanan keuangan pada 2045 menjadi 30,8%	Melakukan pendataan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
Target TPB	8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun (Perpres 59/2017)	Menurun (Perpres 59/2017)	Disnaker	Menurunnya persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Melakukan pendataan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
Target TPB	8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Disperin	Meningkatnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Melakukan pendataan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
<b>TPB</b>	<b>9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</b>					
Target TPB	9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Disperin	Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Melakukan pendataan nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat menjadi 5% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 5% (Perpres 111/2022)	Disperin	Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit pada 2045 menjadi 5%	Melakukan pendataan industri kecil dengan kredit
Target TPB	9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan					
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat menjadi 0,63% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 2,2% (RPJPN 2025-2045)	Bappelitbang	Meningkatnya anggaran riset pemerintah pada tahun 2045 menjadi 2,2%	Melakukan pendataan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>TPB</b>	<b>10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara</b>					
Target TPB	10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya					
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Dinsos	Menurunnya penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	Melakukan pendataan penduduk yang hidup dibawah 50% median pengeluaran per kapita
<b>TPB</b>	<b>17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>					
Target TPB	17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional					
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	BPS	Meningkatnya Jumlah metadata dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Melakukan pendataan jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	BPS	Meningkatnya persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Melakukan pendataan indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>						
<b>TPB</b>	<b>6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua</b>					
Target TPB	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	DPUPR	Meningkatnya populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Melakukan pendataan rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DPUPR	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Melakukan pendataan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
Target TPB	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global					
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DPUPR	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Melakukan pendataan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air					
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Terlaksana (Perpres 59/2017)	Terlaksana (Perpres 59/2017)	DPUPR	Terlaksananya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Melakukan pendataan insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri
<b>TPB</b>	<b>11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>					
Target TPB	11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara					
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	Bappelitbang	Meningkatnya institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Melakukan pendataan institusi yang berperan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan
Target TPB	11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan					
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Maksimal 0,10% PDB (Perpres 111/2022)	Maksimal 0,10% PDB (Perpres 111/2022)	BPBD	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana maksimal sebesar 0,11%	Melakukan pendataan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
<b>TPB</b>	<b>12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>					
Target TPB	12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan					
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DLH	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola	Melakukan pendataan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan
Target TPB	12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat (RPJPN 2025-2045)	DLH	Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Melakukan pendataan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
Target TPB	12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka					
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah Perusahaan (Perpres 111/2022)	Jumlah Perusahaan (Perpres 111/2022)	DLH	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Melakukan pendataan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Target TPB	12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional					
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah Produk (Perpres 111/2022)	Jumlah Produk (Perpres 111/2022)	DLH	Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Melakukan pendataan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
<b>TPB</b>	<b>15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati</b>					
Target TPB	15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal					
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DLH	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	Melakukan pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21
Target TPB	15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keaneekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati.	Dokumen (Perpres 111/2022)	Dokumen (RPJPN 2025-2045)	DLH	Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati	Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati
Target TPB	15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan					
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DLH	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	Melakukan pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>						
<b>TPB</b>	<b>16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>					
Target TPB	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun					
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat menjadi 60% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 80% (RPJPN 2025-2045)	Bakesbangpol	Meningkatnya penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Melakukan pendataan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Target TPB	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	DP3A	Menurunnya jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	Melakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	DP3A	Menurunnya perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	Melakukan pendataan perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

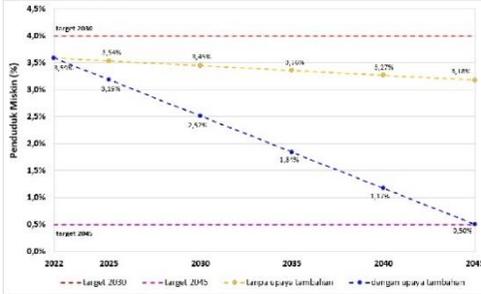
Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,5 (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 4,5 (Roadmap SDGs 2030)	Inspektorat	Meningkatnya IPAK pada tahun 2045 menjadi 4,5	Melakukan pendataan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Target TPB	16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional					
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	Diskominfo	Meningkatnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Melakukan pendataan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersertifikat

**Tabel 12. Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum Mencapai Target**

**1) Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional**

<b>Indikator TPB :</b>	
1.2.1* 10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
<b>Tujuan TPB :</b>	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Menurun menjadi 4-4,5% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Menurun menjadi 0,5-0,8% (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	

**Proyeksi Capaian Indikator TPB :**  
Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mengalami penurunan sebesar 0,02% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,59% dan (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase penduduk miskin akan turun menjadi 3,45% pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 3,18% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,5-0,8% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,13% per-tahun pada periode 2025 – 2045.

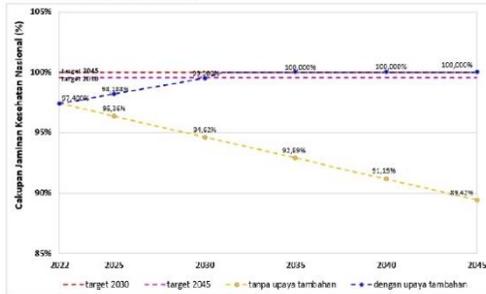


<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2045 menjadi 0,5-0,8%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 2. Penguatan ekonomi lokal dan inklusif; 3. Pembangunan infrastruktur dan teknologi; 4. Peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos

**2) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

<b>Indikator TPB :</b>	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
<b>Tujuan TPB :</b>	
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Optimis	
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan sebesar 0,12% per-tahun. Pada tahun 2022 cakupan JKN tercatat sebesar 97,40% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) cakupan JKN akan meningkat menjadi 94,62% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian menurun menjadi 89,42% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,62% per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		71,54%
2022		97,40%
<b>Proyeksi</b>		
2025	96,36%	98,19%
2030	94,62%	99,50%
2035	92,89%	100%
2040	91,15%	100%
2045	89,42%	100%

<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya cakupan JKN pada tahun 2045 menjadi 99,5%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran; 2. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos

### 3) Peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan

**Indikator TPB :**

1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan

**Tujuan TPB :**

1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

**Target TPB :**

2030 : Meningkatkan menjadi 98% (Perpres 111/2022)

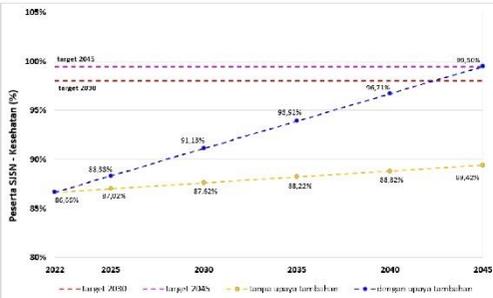
2045 : Meningkatkan menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)

**Alternatif Skenario :**

Moderat

**Proyeksi Capaian Indikator TPB :**

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 0,12% per-tahun. Pada tahun 2022 peserta JSN Bidang Kesehatan tercatat sebesar 86,66% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) peserta JSN Bidang Kesehatan akan meningkat menjadi 87,62% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 89,42% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,56% per-tahun pada periode 2025 – 2045.



**Rekomendasi :**

Sasaran : Meningkatnya cakupan kepesertaan JSN Kesehatan pada tahun 2045 menjadi 99,5%

Strategi dan : 1. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;

Arah Kebijakan : 2. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan;

3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;

4. Kolaborasi dengan stakeholder;

5. Penggunaan teknologi informasi;

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinsos

### 4) Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

**Indikator TPB :**

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

10.4.1.(b)

**Tujuan TPB :**

1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara

**Target TPB :**

2030 : Meningkatkan menjadi 74,57% [tenaga kerja Formal] dan 25,94% [Informal] (Perpres 111/2022)

2045 : Meningkatkan menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)

**Alternatif Skenario :**

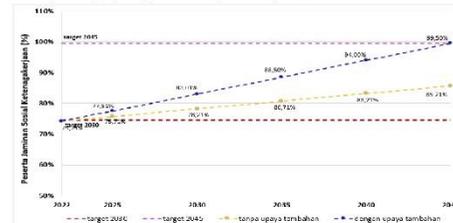
Moderat

**Proyeksi Capaian Indikator TPB :**

a) Tenaga kerja formal  
Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) mengalami peningkatan sebesar 0,5% per-tahun. Pada tahun 2022 peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) tercatat sebesar 74,21% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) akan meningkat menjadi 78,21% pada tahun 2030 (mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 85,71% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan 4,33% per-tahun pada periode 2025-2045.

b) Tenaga kerja informal

Data proporsi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk tenaga Kerja Informal belum/tidak tersedia, sehingga tidak dapat diproyeksi. Untuk mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan 4,33% per-tahun pada 2025 – 2045.



**Rekomendasi :**

Sasaran : Meningkatnya cakupan kepesertaan JSN Ketenagakerjaan pada 2045 menjadi 99,5%

Strategi dan : 1. Peningkatan kesadaran dan edukasi pekerja terutama sektor informal;

Arah Kebijakan : 2. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;

3. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan;

4. Kolaborasi dengan stakeholder;

5. Penggunaan teknologi informasi;

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disnaker

## 5) Median usia kawin pertama perempuan

### Indikator TPB :

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun

### Tujuan TPB :

5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 22,4 thn (Roadmap SDGs 2030)

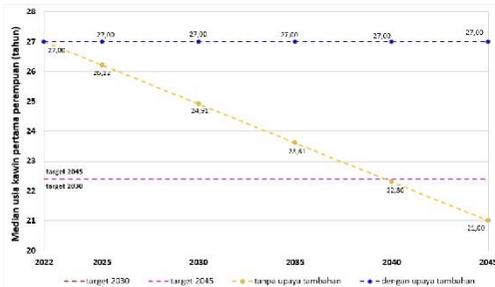
2045 : Meningkat menjadi 22,4 thn (Roadmap SDGs 2030)

### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2021 – 2022 median usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan sebesar 0,2 per-tahun. Pada tahun 2022 median usia kawin pertama perempuan tercatat sebesar 27 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) median usia kawin pertama perempuan akan turun menjadi 24,91 pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 21 pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Untuk percepatan mencapai target indikator TPB pada tahun 2030 (27 tahun) dengan skenario optimis, maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,02 per-tahun pada periode 2025-2030.



### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan menjadi 22,4 tahun  
 Strategi dan : 1. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan;  
 Arah Kebijakan : 2. pemberdayaan perempuan;  
 3. pelibatan tokoh masyarakat dan agama;  
 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
 5. Penggunaan teknologi informasi;  
 6. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : DP2KB

## 6) Age Specific Fertility Rate (ASFR)

### Indikator TPB :

3.7.2\*

5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)

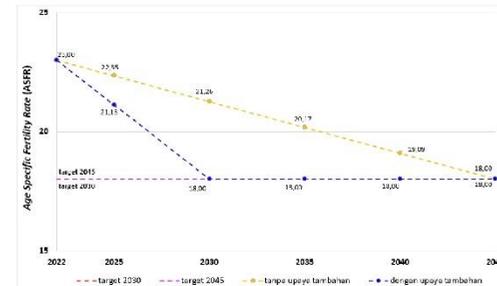
2045 : Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)

### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2021 – 2022 *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami penurunan sebesar 0,2 per-tahun. Pada tahun 2022 ASFR tercatat sebesar 23 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) ASFR akan turun menjadi 21,26 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 18 pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 18 (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,63 per-tahun pada periode 2025-2030.



### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi metode modern menjadi 64,55%  
 Strategi dan : 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;  
 Arah Kebijakan : 2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;  
 3. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;  
 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
 5. Penggunaan teknologi informasi;  
 6. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : DP2KB

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		N.A
2022		23
<i>Proyeksi</i>		
2025	22,35	21,13
2030	21,26	18
2035	20,17	18
2040	19,09	18
2045	18	18

## 7) Perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan

### Indikator TPB :

- 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan  
3.1.2.(a)

### Tujuan TPB :

- 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun  
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

- 2030 : Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 111/2022)  
2045 : Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 111/2022)

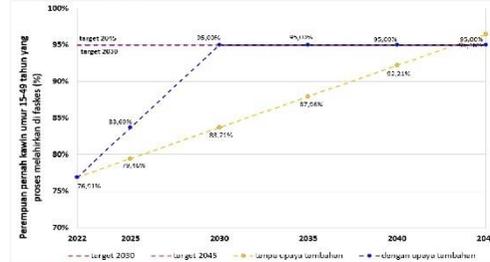
### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan mengalami peningkatan sebesar 0,85% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan tercatat sebesar 76,91% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan akan meningkat menjadi 83,71% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 96,46% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 95% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,26% per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	69,42%	
2022	76,91%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	79,46%	83,69%
2030	83,71%	95%
2035	87,96%	95%
2040	92,21%	95%
2045	96,46%	95%

### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya cakupan persalinan di faskes pada tahun 2045 menjadi 95%  
Strategi dan : 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes;  
Arah Kebijakan : 2. Penguatan sistem rujukan;  
3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
4. Kolaborasi dengan stakeholder;  
5. Penggunaan teknologi informasi;  
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

## 8) Perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih

### Indikator TPB :

- 3.1.2\* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

### Tujuan TPB :

- 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

- 2030 : Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 59/2017)  
2045 : Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 59/2017)

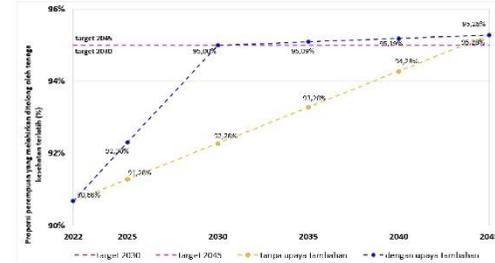
### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih mengalami penurunan sebesar 0,2% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih tercatat sebesar 90,68% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih akan meningkat menjadi 92,28% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 95,28% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 95% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,02% per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	86,16%	
2022	90,68%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	91,28%	92,30%
2030	92,28%	95%
2035	93,28%	95,09%
2040	94,28%	95,19%
2045	95,28%	95,28%

### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil menjadi 95%  
Strategi dan : 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan (terutama pelayanan  
Arah Kebijakan : maternal);  
2. Peningkatan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan;  
3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
4. Penggunaan teknologi informasi;  
5. Kolaborasi dengan stakeholder;  
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

## 9) Angka Kematian Ibu (AKI)

### Indikator TPB :

3.1.1\* Angka Kematian Ibu (AKI)

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 131 (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Menurun menjadi 16 (RPJPN 2025-2045)

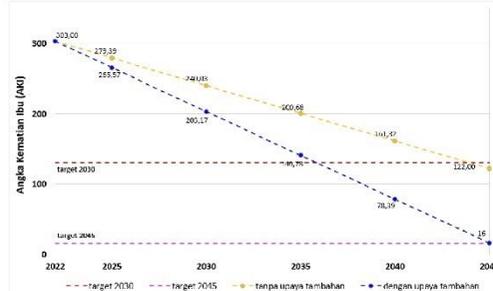
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan sebesar 8 per-tahun. Pada tahun 2022 AKI tercatat sebesar 303,03 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) AKI akan turun menjadi 240,04 pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 122 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 16 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 12,48 per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2045 menjadi 16
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan (terutama pelayanan maternal);
  2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
  3. Penggunaan teknologi informasi;
  4. Kolaborasi dengan stakeholder;
  5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

## 10) Anemia pada ibu hamil

### Indikator TPB :

2.2.2.a) Prevalensi anemia pada ibu hamil

### Tujuan TPB :

2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)

2045 : Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)

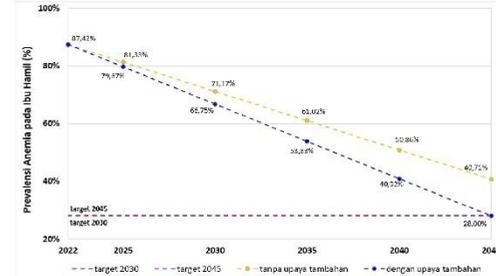
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami penurunan sebesar 2,03% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi anemia pada ibu hamil tercatat sebesar 87,42% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi anemia pada ibu hamil akan turun menjadi 71,17% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 40,71% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 28% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 2,58% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2045 menjadi 28%
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Peningkatan suplementasi dan pemantauan gizi;
  2. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
  3. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
  4. penggunaan teknologi informasi;
  5. kolaborasi dengan stakeholder;
  6. peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

Tahun	Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		85,33%
2022		87,42%
<b>Proyeksi</b>		
2025	81,33%	79,67%
2030	71,17%	66,75%
2035	61,02%	53,83%
2040	50,86%	40,92%
2045	40,71%	28,00%

## 11) Pasangan Usia Subur (PUS)

### Indikator TPB :

5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

### Tujuan TPB :

5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 85% (Perpres 59/2017)

2045 : Meningkat menjadi 85% (Perpres 59/2017)

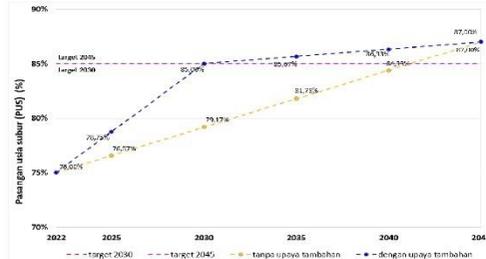
### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern mengalami peningkatan sebesar 0,37% per-tahun. Pada tahun 2022 Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern tercatat sebesar 74,87% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern akan meningkat menjadi 79,17% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 87,00% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 85% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,13% per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	87,64%	
2019	82,23%	
2022	74,87%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	76,57%	78,75%
2030	79,17%	85,00%
2035	81,78%	85,67%
2040	84,39%	86,33%
2045	87,00%	87,00%

### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern pada tahun 2045 menjadi 85%
- Strategi dan Arahan Kebijakan :
1. Peningkatan akses, ketersediaan dan kualitas layanan kb;
  2. pelibatan pria dalam kb;
  3. pelibatan tokoh masyarakat dan agama;
  4. penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;
  5. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
  6. penggunaan teknologi informasi;
  7. kolaborasi dengan stakeholder;
  8. peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : DP2KB

## 12) Tekanan darah tinggi

### Indikator TPB :

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 34,1% (Perpres 111/2022)

2045 : Menurun menjadi 34,1% (Perpres 111/2022)

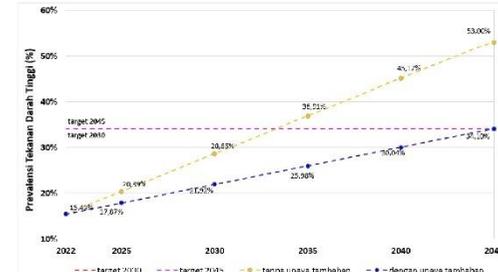
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi tekanan darah tinggi mengalami peningkatan sebesar 2% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi tekanan darah tinggi tercatat sebesar 15,43% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi tekanan darah tinggi akan meningkat menjadi 28,65% pada tahun 2030 (mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 53,00% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 34,1% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,81% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	12%	
2022	15,43%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	20,39%	17,87%
2030	28,65%	21,92%
2035	36,91%	25,98%
2040	45,17%	30,04%
2045	53,00%	34,10%

### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2045 menjadi ≤ 21,8%
- Strategi dan Arahan Kebijakan :
1. Promosi gaya hidup sehat;
  2. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
  3. penggunaan teknologi informasi;
  4. kolaborasi dengan stakeholder;
  5. peningkatan tata kelola pemerintahan

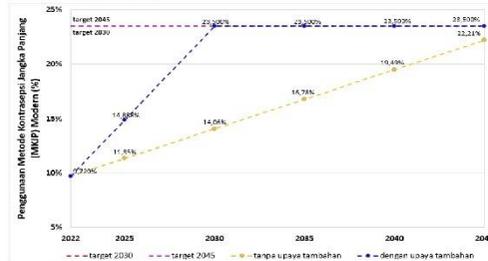
OPD : Dinkes

### 13) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) modern

<b>Indikator TPB :</b>
3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
<b>Tujuan TPB :</b>
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
<b>Target TPB :</b>
2030 : Meningkatkan menjadi 23,5% (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkatkan menjadi 23,5% (Perpres 59/2017)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Optimis
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) modern mengalami penurunan sebesar 0,41% per-tahun. Pada tahun 2022 penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) modern tercatat sebesar 9,72% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) modern akan meningkat menjadi 14,06% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 22,21% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 23,5% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,7% per-tahun pada periode 2025-2030.

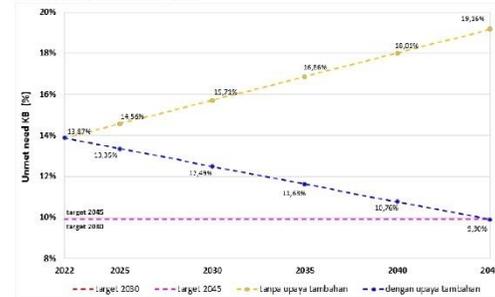


<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran :	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2045 menjadi 23,5%
Strategi dan Arah Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;</li> <li>2. pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>3. penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>4. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>5. penggunaan teknologi informasi;</li> <li>6. kolaborasi dengan stake-holder;</li> <li>7. peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ol>
OPD :	DP2KB

### 14) Unmet need KB

<b>Indikator TPB :</b>
5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
<b>Tujuan TPB :</b>
5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
<b>Target TPB :</b>
2030 : Menurun menjadi 9,9% (Perpres 59/2017)
2045 : Menurun menjadi 9,9% (Perpres 59/2017)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Moderat
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

Berdasarkan data tahun 2021 – 2022 unmet need KB mengalami peningkatan sebesar 0,23% per-tahun. Pada tahun 2022 unmet need KB tercatat sebesar 13,87% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) unmet need KB akan meningkat menjadi 15,71% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 19,16% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 9,9% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,17% per-tahun pada periode 2025-2045.



<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran :	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2045 menjadi 9,9%
Strategi dan Arah Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses, ketersediaan dan kualitas layanan KB;</li> <li>2. Pelibatan pria dalam KB;</li> <li>3. pelibatan tokoh masyarakat dan agama;</li> <li>4. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;</li> <li>5. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>6. Penggunaan teknologi informasi;</li> <li>7. Kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>8. Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ol>
OPD :	DP2KB

## 15) Anak yang menerima imunisasi dasar lengkap

### Indikator TPB :

- 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap  
 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

### Tujuan TPB :

- 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun  
 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

- 2030 : Meningkat menjadi 90% (Perpres 111/2022)  
 2045 : Meningkat menjadi 90% (Perpres 111/2022)

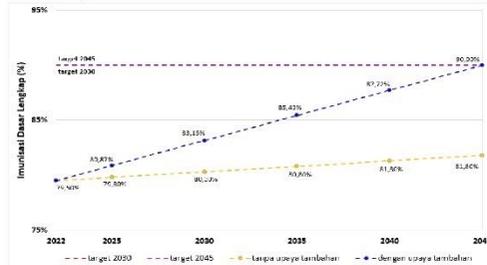
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan sebesar 0,10% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap tercatat sebesar 64,96% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap akan meningkat menjadi 80,30% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 81,80% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 90% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,46% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2045 menjadi 90%.  
 2. Tercapainya minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2045
- Strategi dan Arahan Kebijakan : 1. Peningkatan akses dan distribusi vaksin;  
 2. peningkatan kualitas pelayanan imunisasi;  
 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
 4. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 5. Penggunaan teknologi informasi;  
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- OPD : Dinkes

## 16) Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

### Indikator TPB :

- 2.2.1\* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

### Tujuan TPB :

- 2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

### Target TPB :

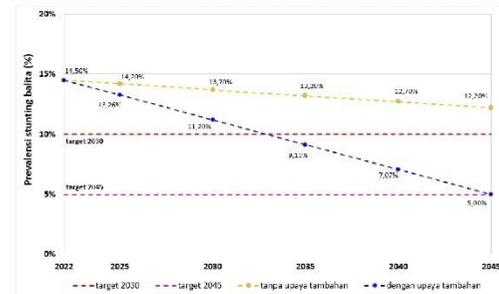
- 2030 : Menurun menjadi 10% (Roadmap SDGs 2030)  
 2045 : Menurun menjadi 5% (RPJPN 2025-2045)

### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita mengalami penurunan sebesar 0,10% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi stunting pada balita tercatat sebesar 14,50% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi stunting pada balita akan turun menjadi 13,70% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 12,20% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,41% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya prevalensi stunting balita pada tahun 2045 menjadi 5%
- Strategi dan Arahan Kebijakan : 1. Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi;  
 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan;  
 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
 4. Penggunaan teknologi informasi;  
 5. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- OPD : Dinkes

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		37,78%
2019		N.A
2022		14,50%
<b>Proyeksi</b>		
2025	14,20%	13,26%
2030	13,70%	11,20%
2035	13,20%	9,13%
2040	12,70%	7,07%
2045	12,20%	5,00%

## 17) Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita

### Indikator TPB :

2.2.2\* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita

### Tujuan TPB :

2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 3% (Roadmap SDGs 2030)

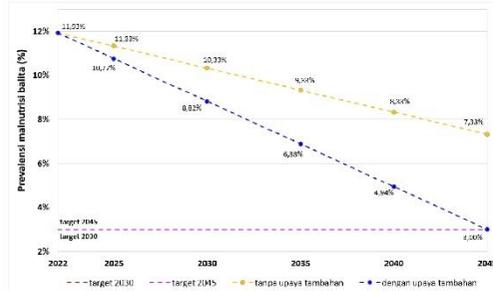
2045 : Menurun menjadi 3% (Roadmap SDGs 2030)

### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita mengalami penurunan sebesar 0,20% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi stunting pada balita tercatat sebesar 11,93% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi malnutrisi pada balita akan turun menjadi 10,33% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 7,33% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 3% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,39% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

Sasaran : Menurunnya prevalensi wasting (kurus) balita pada tahun 2045 menjadi 3%

Strategi dan : 1. Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi;

Arah Kebijakan : 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;

4. Penggunaan teknologi informasi;

5. Kolaborasi dengan stakeholder;

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

## 18) Insiden Tuberkulosis (ITB)

### Indikator TPB :

3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 65 (Roadmap SDGs 2030)

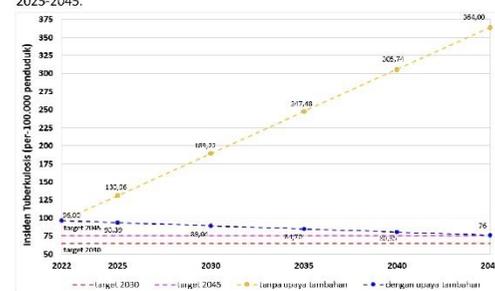
2045 : Menurun menjadi 76 (RPJPN 2025-2045)

### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Insiden Tuberkulosis (ITB) mengalami penurunan sebesar 14/100.000 per-tahun. Pada tahun 2022 Insiden Tuberkulosis (ITB) tercatat sebesar 95,57/100.000 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) Insiden Tuberkulosis (ITB) akan meningkat menjadi 247,48/100.000 pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 364/100.000 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 76/100.000 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,87/100.000 per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

Sasaran : Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2045 menjadi 76

Strategi dan : 1. Penguatan program pencegahan dan pengendalian TB;

Arah Kebijakan : 2. Peningkatan akses perawatan TB;

3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;

4. Penggunaan teknologi informasi;

5. Kolaborasi dengan stakeholder;

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

Tahun	Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		108,17
2022		95,57
<i>Proyeksi</i>		
2025	130,96	93,39
2030	189,22	89,04
2035	247,48	84,70
2040	305,74	80,35
2045	364,00	76,00

## 19) Prevalensi penyalahgunaan narkoba

### Indikator TPB :

3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 0,02% (Perpres 59/2017)

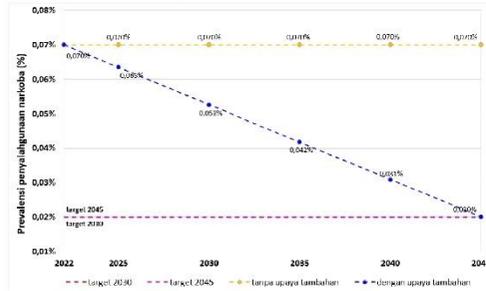
2045 : Menurun menjadi 0,02% (Perpres 59/2017)

### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan sebesar 0,0001% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 0,07% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi penyalahgunaan narkoba akan tetap menjadi 0,07% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian tetap menjadi 0,07% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,02% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,0022% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba  $\leq$  0,02%
- Strategi dan : 1. Penguatan hukum dan penegakan;  
Arah Kebijakan : 2. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial;  
3. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas;  
4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
5. Penggunaan teknologi informasi;  
6. Kolaborasi dengan stakeholder;  
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Bakesbangpol

## 20) Perokok usia $\geq$ 15 tahun

### Indikator TPB :

3.a.1\* Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq$  15 tahun

### Tujuan TPB :

3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 8,71% (Perpres 111/2022)

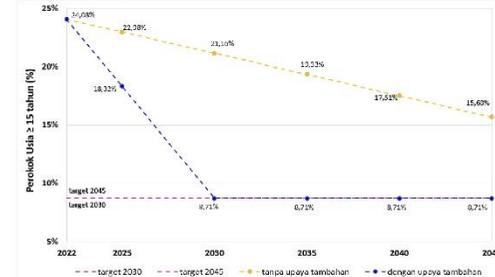
2045 : Menurun menjadi 8,71% (Perpres 111/2022)

### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase merokok pada penduduk umur  $\geq$  15 tahun mengalami penurunan sebesar 0,45% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 24,08% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase merokok pada penduduk umur  $\geq$  15 tahun akan turun menjadi 21,16% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 15,68% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 8,71% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 1,92% per-tahun pada periode 2025-2030.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya persentase perokok usia  $\geq$  15 tahun menjadi 8,71%
- Strategi dan : 1. Penguatan program layanan konseling upaya berhenti merokok;  
Arah Kebijakan : 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
3. Penggunaan teknologi informasi;  
4. Kolaborasi dengan stakeholder;  
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Dinkes

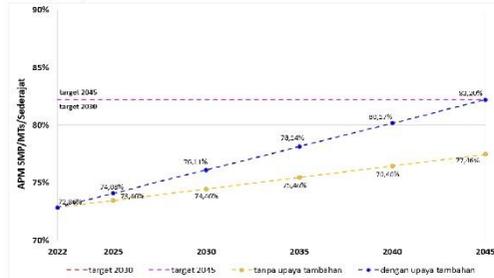
Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	26,29%	
2022	24,08%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	22,98%	18,32%
2030	21,16%	8,71%
2035	19,33%	8,71%
2040	17,51%	8,71%
2045	15,68%	8,71%

## 21) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

<b>Indikator TPB :</b>	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
<b>Tujuan TPB :</b>	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 82,20% (Perpres 59/2017)
2045	: Meningkatkan menjadi 82,20% (Perpres 59/2017)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,20% per-tahun. Pada tahun 2022 APM SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 72,86% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APM SMP/MTs/ sederajat akan meningkat menjadi 74,46% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 77,46% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 82,20% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,41% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

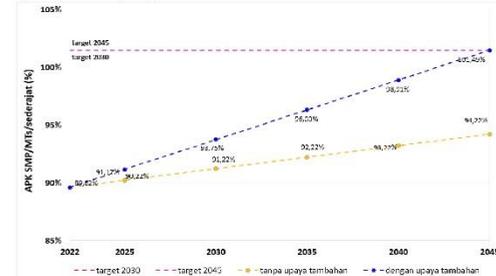
Sasaran	: Meningkatkan APM SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2045 menjadi 82,20%.
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disdik

## 22) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

<b>Indikator TPB :</b>	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
<b>Tujuan TPB :</b>	
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 101,49% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 101,49% (Roadmap SDGs 2030)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,20% per-tahun. Pada tahun 2022 APK SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 89,62% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APK SMP/MTs/ sederajat akan meningkat menjadi 91,22% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 94,22% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 101,49% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,51% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

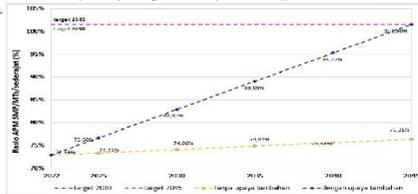
Sasaran	: Meningkatkan APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2045 menjadi 101,49%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disdik

### 23) Rasio APM perempuan/laki-laki

<b>Indikator TPB :</b>
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat
<b>Tujuan TPB :</b>
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
<b>Target TPB :</b>
2030 : SD meningkat menjadi : 99,78%; SMP meningkat menjadi : 101,50% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : SD meningkat menjadi : 99,78%; SMP meningkat menjadi : 101,50% (Roadmap SDGs 2030)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Moderat
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

a. SMP/MTs/ sederajat  
 Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,15% per-tahun. Pada tahun 2022 rasio APM perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 72,86% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rasio APM perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat akan meningkat menjadi 74,06% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 76,31% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 101,50% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,25% per-tahun pada periode 2025-2045.

b. SD/MI/ sederajat  
 Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Rasio APM SD/MI/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,005% per-tahun. Pada tahun 2022 rasio APM tercatat sebesar 99,38% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi BAU rasio APM akan naik menjadi 99,78% pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 100,53% pada tahun 2045 (mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu dipertahankan.



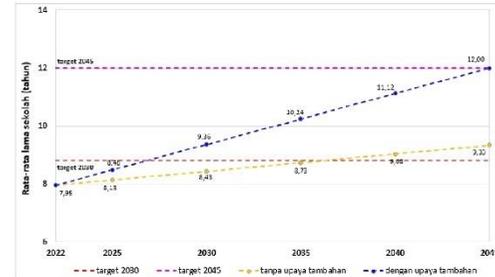
Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	69,81%	
2015	67,63%	
2019	72,31%	
2022	72,86%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	73,31%	76,60%
2030	74,06%	82,82%
2035	74,81%	89,05%
2040	75,56%	95,27%
2045	76,31%	101,50%

<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	Meningkatnya rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat menjadi 99,78 & SMP/MTs/ sederajat menjadi 101,50
Strategi dan Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>4. Penggunaan teknologi informasi;</li> <li>5. Kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>6. Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ol>
OPD	: Disdik

### 24) Rata-rata lama sekolah

<b>Indikator TPB :</b>
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
<b>Tujuan TPB :</b>
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
<b>Target TPB :</b>
2030 : Meningkatkan menjadi 8,8 tahun (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkatkan menjadi 12 tahun (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Moderat
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,06 per-tahun. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,95 (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rata-rata lama sekolah akan meningkat menjadi 8,43 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 9,33 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 12 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,18 per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		7,75
2022		7,95
<b>Proyeksi</b>		
2025	8,13	8,48
2030	8,43	9,36
2035	8,73	10,24
2040	9,03	11,12
2045	9,33	12,00

<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2045 menjadi 12 tahun
Strategi dan Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses, infrastruktur dan kualitas pendidikan;</li> <li>2. Program khusus untuk kelompok rentan;</li> <li>3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi;</li> <li>4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;</li> <li>5. Penggunaan teknologi informasi;</li> <li>6. Kolaborasi dengan stakeholder;</li> <li>7. Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> </ol>
OPD	: Disdik

## 25) SD/MI berakreditasi minimal B

### Indikator TPB :

4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

### Tujuan TPB :

4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 84,2% (Perpres 59/2017)

2045 : Meningkat menjadi 84,2% (Perpres 59/2017)

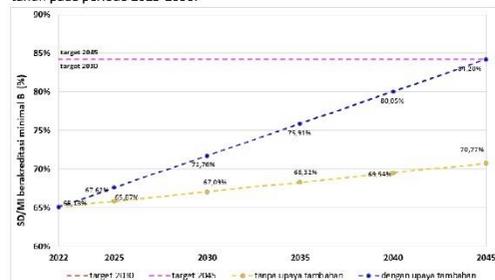
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase SD/MI berakre-ditasi minimal B mengalami peningkatan sebesar 0,51% per-tahun. Pada tahun 2022 SD/MI berakreditasi minimal B tercatat sebesar 65,13% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) SD/MI berakreditasi minimal B akan meningkat menjadi 67,09% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 70,77% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 84,20% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,83% per-tahun pada periode 2025-2030.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi min. B pada tahun 2045 menjadi 84,2%
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah;
  2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
  3. Penguatan manajemen sekolah;
  4. Pelibatan orang tua dan komunitas;
  5. Penggunaan teknologi informasi;
  6. Kolaborasi dengan stakeholder;
  7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdik

## 26) Guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik

### Indikator TPB :

4.c.1\* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik

### Tujuan TPB :

4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Meningkat menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)

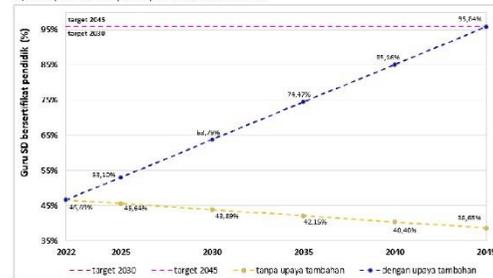
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase guru SD bersertifikat pendidik mengalami penurunan sebesar 0,48% per-tahun. Pada tahun 2022 guru SD bersertifikat pendidik tercatat sebesar 49,69% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) guru SD bersertifikat pendidik akan turun menjadi 43,89% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 38,65% pada tahun 2045 (belum mencapai target SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 95,84% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,14% per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya persentase guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik menjadi 95,84%
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Peningkatan program sertifikasi guru;
  2. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan;
  3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
  4. Program khusus untuk guru di daerah terpencil;
  5. Penggunaan teknologi informasi;
  6. Kolaborasi dengan stakeholder;
  7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdik

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		N.A
2022		49,69%
<i>Proyeksi</i>		
2025	45,64%	53,10%
2030	43,89%	63,79%
2035	42,15%	74,47%
2040	40,40%	85,16%
2045	38,65%	95,84%

## 27) Guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik

### Indikator TPB :

4.c.1\* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik

### Tujuan TPB :

4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

### Target TPB :

2030 : Meningkatkan menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Meningkatkan menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)

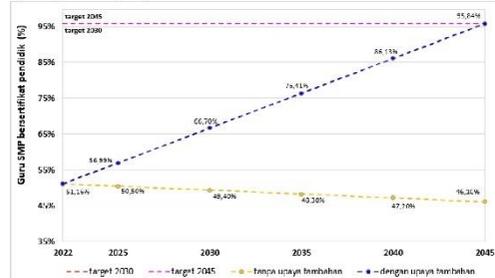
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase guru SMP bersertifikat pendidik mengalami penurunan sebesar 0,22% per-tahun. Pada tahun 2022 guru SMP bersertifikat pendidik tercatat sebesar 51,16% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) guru SMP bersertifikat pendidik akan turun menjadi 49,40% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 46,10% pada tahun 2045 (belum mencapai target SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 95,84% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,94% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	N.A	
2022	51,16%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	50,50%	56,99%
2030	49,40%	66,70%
2035	48,30%	76,41%
2040	47,20%	86,13%
2045	46,10%	95,84%

### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya persentase guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik menjadi 95,84%

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan program sertifikasi guru;
2. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
4. Program khusus untuk guru di daerah terpencil;
5. Penggunaan teknologi informasi;
6. Kolaborasi dengan stakeholder;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdik

## 28) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

### Indikator TPB :

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

### Tujuan TPB :

4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

### Target TPB :

2030 : Meningkatkan menjadi 106,24% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Meningkatkan menjadi 106,24% (Roadmap SDGs 2030)

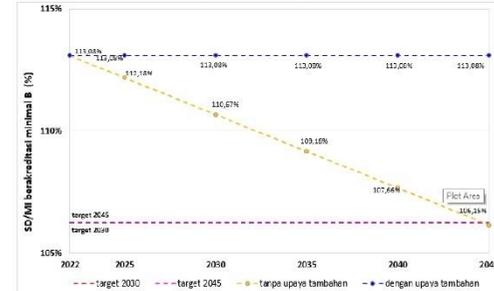
### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 APK SD/MI/Sederajat mengalami penurunan sebesar 0,30% per-tahun. Pada tahun 2022 APK SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 113,08% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APK SD/MI/Sederajat akan turun menjadi 110,67% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 106,15% pada tahun 2045 (belum mencapai target SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mempercepat mencapai target indikator TPB sebesar 113,08% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (113,08%).



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	113,08%	
2015	115,00%	
2019	114,57%	
2022	113,08%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	112,18%	113,08%
2030	110,67%	113,08%
2035	109,16%	113,08%
2040	107,66%	113,08%
2045	106,15%	113,08%

### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya APK SD/MI/ sederajat pada tahun 2045 menjadi 106,24%

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;
2. peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
3. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
4. penggunaan teknologi informasi;
5. Kolaborasi dengan stakeholder;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdik

## 29) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

### Indikator TPB :

4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

### Tujuan TPB :

4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)

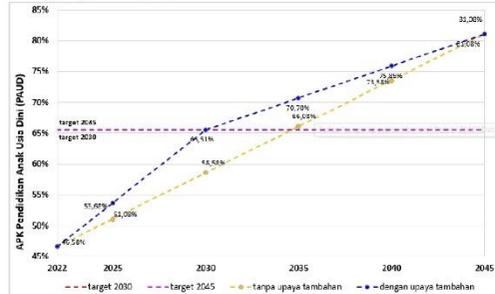
### Alternatif Skenario :

Optimis

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 APK PAUD mengalami peningkatan sebesar 1,50% per-tahun. Pada tahun 2022 APK PAUD tercatat sebesar 46,58% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APK PAUD akan meningkat menjadi 58,58% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 81,08% pada tahun 2045 (belum mencapai target SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 65,51% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,04% per-tahun pada periode 2025-2030.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya APK PAUD pada tahun 2045 menjadi 65,51%
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;
  2. peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
  3. peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;
  4. penggunaan teknologi informasi;
  5. Penggunaan teknologi informasi;
  6. Kolaborasi dengan stakeholder;
  7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdik

## 30) Korban terkena dampak bencana

### Indikator TPB :

1.5.1\* ; 11.5.1\* : Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 13.1.2\*

### Tujuan TPB :

1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

### Target TPB :

2030 : Maksimal 0,2 per 100.000 jiwa (Perpres 111/2022)

2045 : Maksimal 0,2 per 100.000 jiwa (Perpres 111/2022)

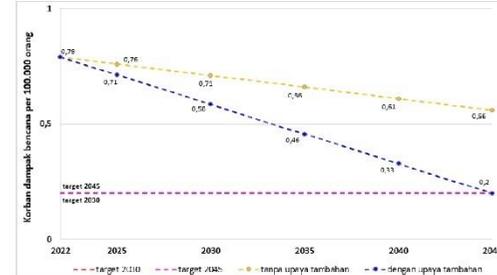
### Alternatif Skenario :

Moderat

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang mengalami penurunan sebesar 0,01 per-tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,79 (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang akan turun menjadi 0,71 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 0,56 pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,2 (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,03 per-tahun pada periode 2025-2045.



### Rekomendasi :

- Sasaran : Jumlah korban meninggal, hilang & terkena dampak bencana maks. 0,2/100.000 jiwa/thn
- Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Perencanaan dan pengelolaan tata ruang;
  2. Peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat;
  3. Penguatan sistem tanggap darurat;
  4. Penggunaan teknologi informasi;
  5. Kolaborasi dengan stakeholder;
  6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : BPBD

Tahun	Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		1,84
2022		0,79
<b>Proyeksi</b>		
2025	0,76	0,71
2030	0,71	0,58
2035	0,66	0,46
2040	0,61	0,33
2045	0,56	0,2

### 31) Akses terhadap layanan sanitasi layak

#### Indikator TPB :

1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan  
6.2.1.(b)

#### Tujuan TPB :

1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun  
6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

#### Target TPB :

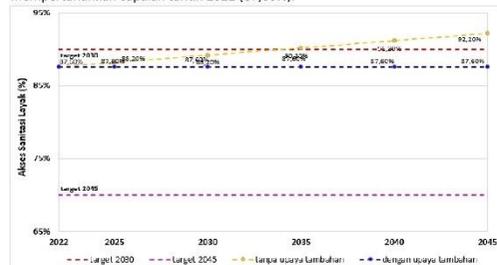
2030 : Meningkatkan menjadi 90% (Perpres 111/2022)  
2045 : Meningkatkan menjadi 70% (RPJPN 2025-2045)

#### Alternatif Skenario :

Optimis

#### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mengalami peningkatan sebesar 0,20% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tercatat sebesar 87,60% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak akan meningkat menjadi 89,20% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 92,20% pada tahun 2045 (mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 70% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (87,60%).



#### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya akses sanitasi layak pada tahun 2045 menjadi 70%.  
Strategi dan : 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi;  
Arah Kebijakan : 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
3. Penggunaan teknologi informasi;  
4. Kolaborasi dengan stakeholder;  
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : DPUPR

### 32) Laju pertumbuhan PDB per kapita

#### Indikator TPB :

8.1.1\* Laju pertumbuhan PDB per kapita

#### Tujuan TPB :

8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

#### Target TPB :

2030 : Meningkatkan menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)  
2045 : Meningkatkan menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)

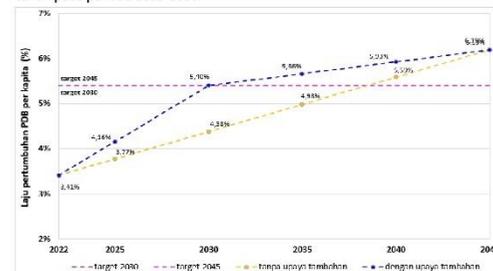
#### Alternatif Skenario :

Optimis

#### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 laju pertumbuhan PDB per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,12% per-tahun. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDB per kapita tercatat sebesar 3,41% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) laju pertumbuhan PDB per kapita akan meningkat menjadi 4,38% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 6,19% pada tahun 2045 (mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 5,4% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,05% per-tahun pada periode 2025-2030.



#### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per kapita pada tahun 2045 menjadi 5,4%  
Strategi dan : Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor  
Arah Kebijakan : industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Bappeltbang

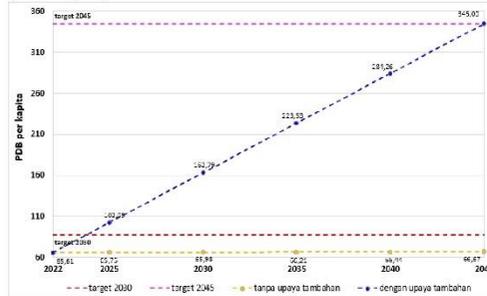
Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	2,55%	
2019	4,06%	
2022	3,41%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	3,77%	4,16%
2030	4,38%	5,40%
2035	4,98%	5,66%
2040	5,59%	5,93%
2045	6,19%	6,19%

### 33) PDB per kapita

<b>Indikator TPB :</b>
8.1.1.(a) PDB per kapita
<b>Tujuan TPB :</b>
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
<b>Target TPB :</b>
2030 : Meningkatkan menjadi 87,15 juta (Perpres 111/2022)
2045 : Meningkatkan menjadi 345 juta (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Moderat
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 PDB per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,15 juta per-tahun. Pada tahun 2022 PDB per kapita tercatat sebesar 65,61 juta (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) PDB per kapita akan meningkat menjadi 65,98 juta pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 66,67 juta pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 345 juta (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 12,15 juta per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		29,01
2015		35,62
2019		44,09
2022		65,61
<b>Proyeksi</b>		
2025	65,75	102,05
2030	65,98	162,79
2035	66,21	223,53
2040	66,44	284,26
2045	66,67	345

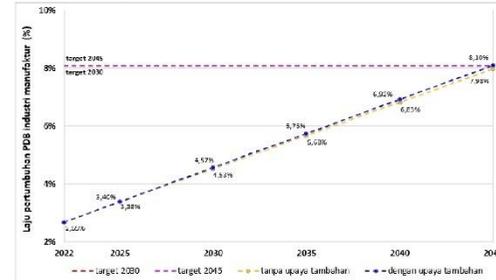
<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran :	Meningkatnya PDB per kapita menjadi 345 juta
Strategi dan Arah Kebijakan :	Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD :	Bappelitbang

### 34) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

<b>Indikator TPB :</b>
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
<b>Tujuan TPB :</b>
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
<b>Target TPB :</b>
2030 : Meningkatkan menjadi 8,1% (Perpres 111/2022)
2045 : Meningkatkan menjadi 8,1% (Perpres 111/2022)
<b>Alternatif Skenario :</b>
Moderat
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami peningkatan sebesar 0,23% per-tahun. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tercatat sebesar 2,69% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur akan meningkat menjadi 4,53% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 7,98% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 87,15% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,24% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		2,80%
2019		4,29%
2022		2,69%
<b>Proyeksi</b>		
2025	3,38%	3,40%
2030	4,53%	4,57%
2035	5,68%	5,75%
2040	6,83%	6,92%
2045	7,98%	8,10%

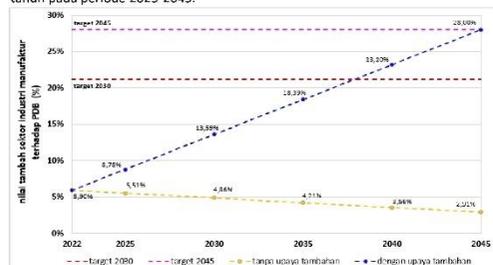
<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran :	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur pada 2045 menjadi 8,1%
Strategi dan Arah Kebijakan :	Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD :	Disperin

### 35) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB

<b>Indikator TPB :</b>	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB
<b>Tujuan TPB :</b>	
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 21,2% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 28% (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,13% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB tercatat sebesar 5,90% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB akan turun menjadi 4,86% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 2,91% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 28% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,96% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		7,78%
2015		6,24%
2019		6,15%
2022		5,90%
<b>Proyeksi</b>		
2025	5,51%	8,78%
2030	4,86%	13,59%
2035	4,21%	18,39%
2040	3,56%	23,20%
2045	2,91%	28,00%

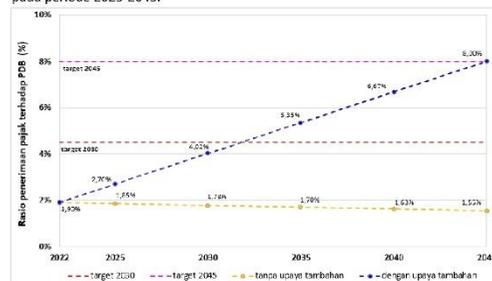
<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB menjadi 28%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur industri; pengembangan inovasi dan penelitian; pengembangan sdm; dukungan keuangan; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disperin

### 36) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

<b>Indikator TPB :</b>	
8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
<b>Tujuan TPB :</b>	
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 4,5% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 8% (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,02% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB tercatat sebesar 1,90% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB akan turun menjadi 1,78% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 1,55% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 8% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,27% per-tahun pada periode 2025-2045.



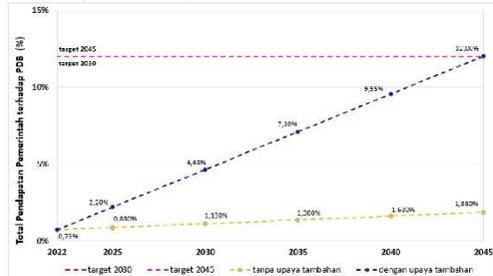
Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		1,97%
2015		2,23%
2019		2,38%
2022		1,90%
<b>Proyeksi</b>		
2025	1,85%	2,70%
2030	1,78%	4,02%
2035	1,70%	5,35%
2040	1,63%	6,67%
2045	1,55%	8,00%

<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada 2045 menjadi 8%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan destinasi pariwisata; pengembangan produk wisata; peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; penguatan pemasaran dan promosi; pengembangan sumber daya manusia; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disbudpar

### 37) Total pendapatan pemerintah terhadap PDB

<b>Indikator TPB :</b>	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya
<b>Tujuan TPB :</b>	
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 11,4 - 12,0% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 11,4 - 12,0% (Perpres 111/2022)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 total pendapatan pemerintah terhadap PDB mengalami peningkatan sebesar 0,05% per-tahun. Pada tahun 2022 total pendapatan pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 0,73% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) total pendapatan pemerintah terhadap PDB akan meningkat menjadi 1,13% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 1,88% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 12% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,49% per-tahun pada periode 2025-2045.

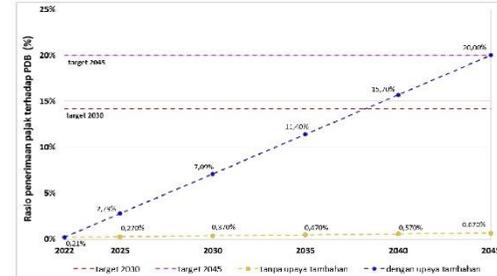


<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB menjadi 11,4-12,0%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan ukm dan ekonomi kreatif; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Bapenda

### 38) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

<b>Indikator TPB :</b>	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
<b>Tujuan TPB :</b>	
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 14,2% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 18-20% (RPJPN 2025-2045)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Moderat	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 rasio penerimaan pajak terhadap PDB mengalami peningkatan sebesar 0,02% per-tahun. Pada tahun 2022 rasio penerimaan pajak terhadap PDB tercatat sebesar 0,21% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rasio penerimaan pajak terhadap PDB akan meningkat menjadi 0,37% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 0,67% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 20% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,86% per-tahun pada periode 2025-2045.



<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya rasio penerimaan pajak pada tahun 2045 menjadi 18-20%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan ukm dan ekonomi kreatif; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Bapenda

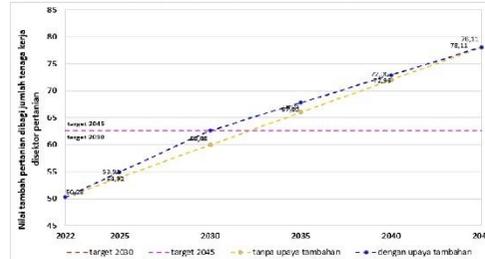
Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		0,12%
2015		0,21%
2019		0,50%
2022		0,21%
<b>Proyeksi</b>		
2025	0,27%	2,79%
2030	0,37%	7,09%
2035	0,47%	11,40%
2040	0,57%	15,70%
2045	0,67%	20,00%

### 39) Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian

<b>Indikator TPB :</b>	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
<b>Tujuan TPB :</b>	
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Optimis	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,21 jt/tenaga kerja per-tahun. Pada tahun 2022 nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tercatat sebesar 50,28 jt/tenaga kerja/thn (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian akan meningkat menjadi 59,96 jt/tenaga kerja/thn pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 78,11 jt/tenaga kerja/thn pada tahun 2045 (mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 62,65 jt/tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,03 jt/tenaga kerja per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	9,87	
2015	13,34	
2019	47,35	
2022	50,28	
<b>Proyeksi</b>		
2025	53,91	54,92
2030	59,96	62,65
2035	66,01	67,80
2040	72,06	72,96
2045	78,11	78,11

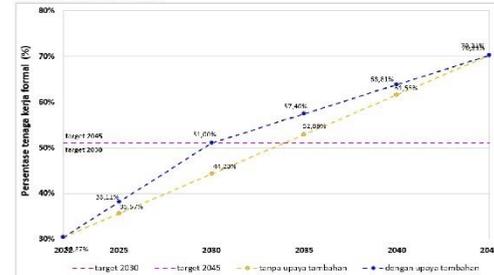
<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya nilai tambah pertanian pada tahun 2045 menjadi Rp. 62,65 jt/tenaga kerja/thn
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; pengembangan infrastruktur pertanian; penguatan kapasitas petani; diversifikasi produksi pertanian; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Diperta

### 40) Tenaga kerja formal

<b>Indikator TPB :</b>	
8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal
<b>Tujuan TPB :</b>	
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
<b>Target TPB :</b>	
2030	: Meningkatkan menjadi 51% (Perpres 59/2017)
2045	: Meningkatkan menjadi 51% (Perpres 59/2017)
<b>Alternatif Skenario :</b>	
Optimis	
<b>Proyeksi Capain Indikator TPB :</b>	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase tenaga kerja formal mengalami peningkatan sebesar 1,73% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase tenaga kerja formal tercatat sebesar 30,37% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase tenaga kerja formal akan meningkat menjadi 44,23% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 70,21% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 51% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,28% per-tahun pada periode 2025-2030.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	9,03%	
2019	29,08%	
2022	30,37%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	35,57%	38,11%
2030	44,23%	51,00%
2035	52,89%	57,40%
2040	61,55%	63,81%
2045	70,21%	70,21%

<b>Rekomendasi :</b>	
Sasaran	: Meningkatnya persentase tenaga kerja formal pada tahun 2045 menjadi 51%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas dan daya saing; pengembangan infrastruktur ekonomi; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disnaker

#### 41) Tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

##### Indikator TPB :

9.2.2\* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

##### Tujuan TPB :

9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

##### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Meningkat menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)

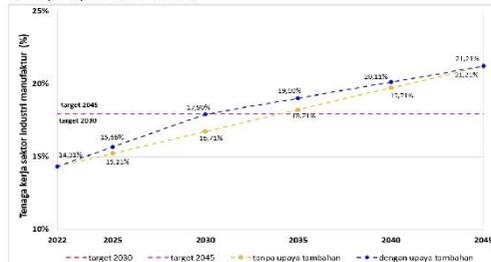
##### Alternatif Skenario :

Optimis

##### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur mengalami peningkatan sebesar 0,30% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tercatat sebesar 14,31% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur akan meningkat menjadi 16,71% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 21,21% pada tahun 2045 (mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 17,9% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,22% per-tahun pada periode 2025-2030.



##### Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur menjadi 17,9%
- Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas dan daya saing; pengembangan infrastruktur ekonomi; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
- OPD : Disnaker

#### 42) Tingkat pengangguran terbuka

##### Indikator TPB :

8.5.2\* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

##### Tujuan TPB :

8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

##### Target TPB :

2030 : Menurun menjadi 3,8% (Roadmap SDGs 2030)

2045 : Menurun menjadi 4% (RPJPN 2025-2045)

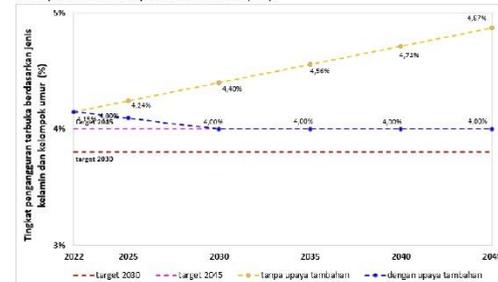
##### Alternatif Skenario :

Optimis

##### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,03% per-tahun. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,15% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) tingkat pengangguran terbuka akan meningkat menjadi 4,56% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 4,87% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 4% (RPJPN 2025-2045) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2030 (4%).



##### Rekomendasi :

- Sasaran : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada 2045 menjadi 4%
- Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan pendidikan dan pelatihan; penciptaan lapangan kerja; pengembangan pasar tenaga kerja; dukungan untuk kewirausahaan; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
- OPD : Disnaker

### 43) Layanan mobile broadband

#### Indikator TPB :

9.c.1\* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband  
17.6.2.(c)

#### Tujuan TPB :

9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi  
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

#### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)  
2045 : Meningkat menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)

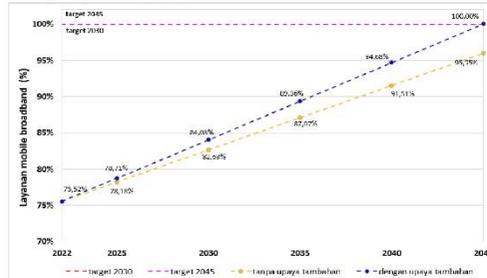
#### Alternatif Skenario :

Moderat

#### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 layanan mobile broadband mengalami peningkatan sebesar 0,89% per-tahun. Pada tahun 2022 layanan mobile broadband tercatat sebesar 75,52% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) layanan mobile broadband akan meningkat menjadi 82,63% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 95,95% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,06% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	N.A	
2022	75,52%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	78,18%	87,71%
2030	82,63%	84,03%
2035	87,07%	89,36%
2040	91,51%	94,68%
2045	95,95%	100,00%

#### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya penduduk yang terlayani mobile broadband pada 2045 menjadi 100%  
Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi; peningkatan keter-sediaan dan aksesibilitas perangkat; peningkatan literasi digital; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Diskominfo

### 44) Tingkat penetrasi akses fixed broadband di perkotaan dan pedesaan

#### Indikator TPB :

17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan

#### Tujuan TPB :

17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

#### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 71% (Perpres 59/2017)  
2045 : Meningkat menjadi 71% (Perpres 59/2017)

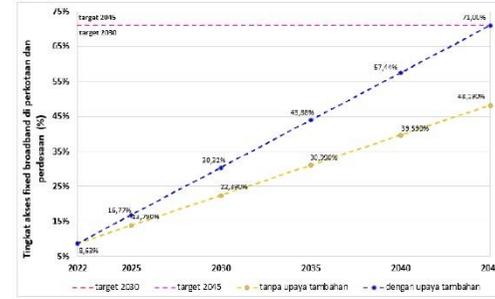
#### Alternatif Skenario :

Moderat

#### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 tingkat penetrasi akses pitalebar mengalami peningkatan sebesar 1,72% per-tahun. Pada tahun 2022 pengguna internet tercatat sebesar 8,63% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) tingkat penetrasi akses pitalebar akan meningkat menjadi 22,39% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian meningkat menjadi 48,19% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 71% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,71% per-tahun pada periode 2025-2045.



#### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya akses tetap pitalebar (fixed broadband) pada 2045 menjadi 71%  
Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi; peningkatan literasi digital; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Diskominfo

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	N.A	
2022	8,63%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	13,79%	16,77%
2030	22,39%	30,32%
2035	30,99%	43,88%
2040	39,59%	57,44%
2045	48,19%	71,00%

#### 45) Pengguna Internet

##### Indikator TPB :

9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet  
17.8.1\*

##### Tujuan TPB :

9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi  
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

##### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 89,1% (Roadmap SDGs 2030)  
2045 : Meningkat menjadi 89,1% (Roadmap SDGs 2030)

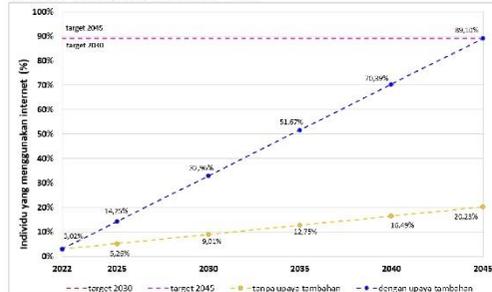
##### Alternatif Skenario :

Moderat

##### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 pengguna internet mengalami peningkatan sebesar 0,93% per-tahun. Pada tahun 2022 pengguna internet tercatat sebesar 3,02% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) pengguna internet akan meningkat menjadi 9,01% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 20,23% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 89,1% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 3,74% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	11,17%	
2022	3,02%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	5,26%	14,25%
2030	9,01%	32,96%
2035	12,75%	51,67%
2040	16,49%	70,39%
2045	20,23%	89,10%

##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya individu yang menggunakan internet pada 2045 menjadi 89,1%  
Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi; peningkatan keter-sediaan dan aksesibilitas perangkat; peningkatan literasi digital; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan  
OPD : Diskominfo

#### 46) Kepemilikan akte kelahiran pada Balita

##### Indikator TPB :

16.9.1\* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

##### Tujuan TPB :

16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat

##### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)  
2045 : Meningkat menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)

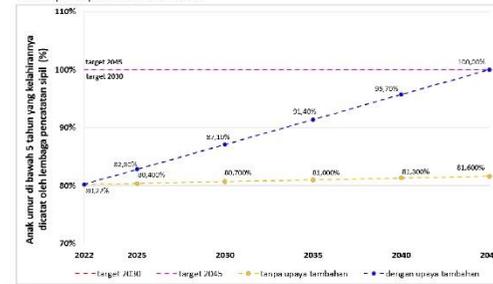
##### Alternatif Skenario :

Moderat

##### Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 kepemilikan akte kelahiran pada Balita mengalami peningkatan sebesar 0,06% per-tahun. Pada tahun 2022 kepemilikan akte kelahiran pada Balita tercatat sebesar 80,22% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) kepemilikan akte kelahiran pada Balita akan meningkat menjadi 80,70% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 81,60% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,86% per-tahun pada periode 2025-2045.



Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	82,65%	
2022	80,22%	
<b>Proyeksi</b>		
2025	80,40%	82,80%
2030	80,70%	87,10%
2035	81,00%	91,40%
2040	81,30%	95,70%
2045	81,60%	100%

##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya tercatat menjadi 100%  
Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan pencatatan sipil; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan  
OPD : Disdukcapil

#### 47) Anak yang memiliki akta kelahiran

##### Indikator TPB :

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

##### Tujuan TPB :

16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

##### Target TPB :

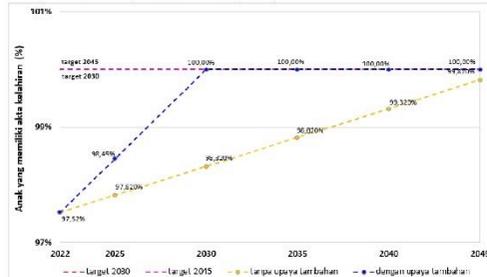
2030 : Meningkatkan menjadi 100% (Perpres 111/2022)  
2045 : Meningkatkan menjadi 100% (Perpres 111/2022)

##### Alternatif Skenario :

Optimis

##### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 anak yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sebesar 0,10% per-tahun. Pada tahun 2022 anak yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 97,52% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) anak yang memiliki akta kelahiran akan meningkat menjadi 98,32% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 99,82% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2030 (100%).



##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya kepemilikan akte lahir untuk pada tahun 2045 menjadi 77,40%

Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan pencatatan sipil; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : Disdukcapil

#### 48) Sampah kota yang tertangani

##### Indikator TPB :

11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani

##### Tujuan TPB :

11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

##### Target TPB :

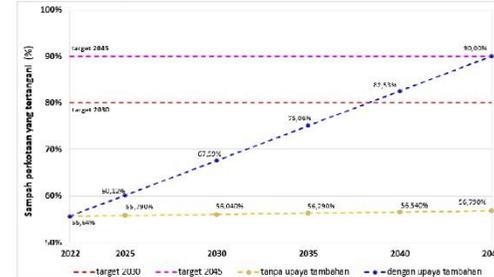
2030 : Meningkatkan menjadi 80% (Perpres 111/2022)  
2045 : Meningkatkan menjadi 90% (RPJPN 2025-2045)

##### Alternatif Skenario :

Moderat

##### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 sampah kota yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 0,05% per-tahun. Pada tahun 2022 sampah kota yang tertangani tercatat sebesar 55,64% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) sampah kota yang tertangani akan meningkat menjadi 56,04% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 56,79% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 90% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,49% per-tahun pada periode 2025-2045.



##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2045 menjadi 90%

Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah; penguatan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah; pengembangan ekonomi sirkular; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan

OPD : DLH

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		N.A
2019		N.A
2022		97,52%
<b>Proyeksi</b>		
2025	97,82%	98,45%
2030	98,32%	100%
2035	98,82%	100%
2040	99,32%	100%
2045	99,82%	100%

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		9,81%
2015		42%
2019		51,41%
2022		55,64%
<b>Proyeksi</b>		
2025	55,79%	60,12%
2030	56,04%	67,59%
2035	56,29%	75,06%
2040	56,54%	82,53%
2045	56,79%	90,00%

#### 49) Akses terhadap layanan sumber air minum layak

##### Indikator TPB :

1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan  
6.1.1.(a)

##### Tujuan TPB :

1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun  
6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

##### Target TPB :

2030 : Meningkat menjadi 100% (Perpres 111/2022)  
2045 : Meningkat menjadi 100% (Perpres 111/2022)

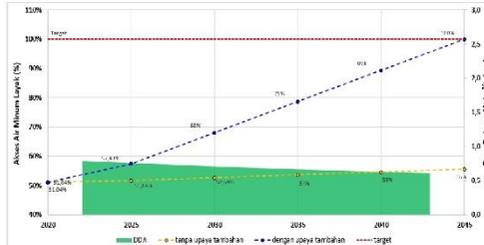
##### Alternatif Skenario :

Moderat

##### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami peningkatan sebesar 0,20% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak tercatat sebesar 51,04% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak akan meningkat menjadi 53,64% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 55,64% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,13% per-tahun pada periode 2025-2045.



##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya akses air minum pada tahun 2045 menjadi 100%.  
Strategi dan Arah Kebijakan : Pembangunan infrastruktur air minum; Perlindungan sumber daya air; Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; Penggunaan teknologi informasi; Kolaborasi dengan stakeholder; Peningkatan tata kelola pemerintahan  
OPD : Disperkimta

#### 50) Kualitas Konsumsi Pangan

##### Indikator TPB :

2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan (TKI)

##### Tujuan TPB :

2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

##### Target TPB :

2030 : PPH meningkat menjadi 92,5 dan TKI meningkat menjadi 54,5 kg/kapita/tahun (Perpres 59/2017)  
2045 : PPH meningkat menjadi 92,5 dan TKI meningkat menjadi 54,5 kg/kapita/tahun (Perpres 59/2017)

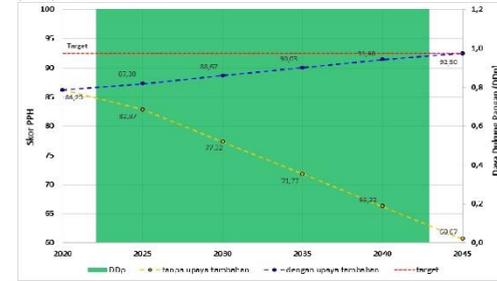
##### Alternatif Skenario :

Moderat

##### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 kualitas konsumsi pangan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan sebesar 0,25 per-tahun. Pada tahun 2022 kualitas konsumsi pangan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercatat sebesar 86,2 (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) kualitas konsumsi pangan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) akan turun menjadi 77,32 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 60,67 pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 92,5 (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,27 per-tahun pada periode 2025-2045.



##### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya akses air minum pada tahun 2045 menjadi 100%.  
Strategi dan Arah Kebijakan : Pembangunan infrastruktur air minum; Perlindungan sumber daya air; Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; Penggunaan teknologi informasi; Kolaborasi dengan stakeholder; Peningkatan tata kelola pemerintahan  
OPD : Disperkimta

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<b>Baseline</b>		
2012		N.A
2015		52,56
2019		93,8
2022		86,2
<b>Proyeksi</b>		
2025	82,87	87,30
2030	77,32	88,67
2035	71,77	90,03
2040	66,22	91,40
2045	60,67	92,5

## 51) Kapasitas prasarana air baku

### Indikator TPB :

6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.

### Tujuan TPB :

6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

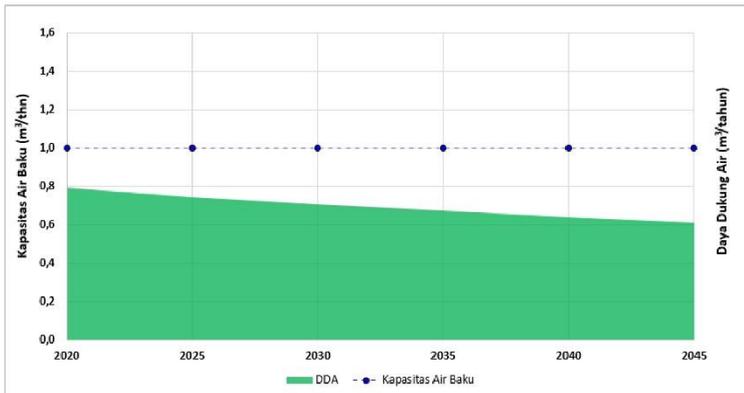
### Target TPB :

2030 : Meningkatkan (Perpres 111/2022)

2045 : Meningkatkan (Perpres 111/2022)

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian 2022	Proyeksi Capaian					Status Capaian	
	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045
372	372	372	372	372	372	Mencapai Target	Mencapai Target



### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya kapasitas prasarana air baku  
 Strategi dan : 1. Investasi dalam infrastruktur air baku;  
 Arah Kebijakan : 2. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;  
 3. Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia;  
 4. Penggunaan teknologi informasi;  
 5. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan  
 OPD : DPUPR

## 52) Akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

### Indikator TPB :

6.1.1.(c) Kapasitas Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

### Tujuan TPB :

6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

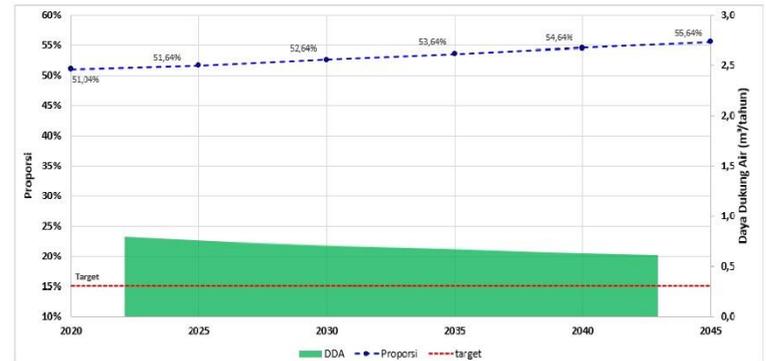
### Target TPB :

2030 : Meningkatkan menjadi 15% (Perpres 111/2022)

2045 : Meningkatkan menjadi 15% (Perpres 111/2022)

### Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian 2022	Proyeksi Capaian					Status Capaian	
	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045
51,04%	51,64%	52,64%	53,64%	54,64%	55,64%	Mencapai Target	Mencapai Target



### Rekomendasi :

Sasaran : Meningkatnya kapasitas prasarana air baku  
 Strategi dan : 1. Pembangunan infrastruktur air minum;  
 Arah Kebijakan : 2. Perlindungan sumber daya air;  
 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;  
 4. Penggunaan teknologi informasi;  
 5. Kolaborasi dengan stakeholder;  
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan  
 OPD : Disperkimtan

## Bab 6

# Kesimpulan

- 1) Daya Dukung Daya Tampung Daerah
  - a) Daya dukung lahan permukiman  
Daya dukung lahan permukiman DDLPm Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,9 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga  $\pm$  570.012 jiwa.
  - b) Daya dukung pangan  
Daya dukung pangan DDPn Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,57 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga  $\pm$  499.089 penduduk.
  - c) Daya dukung air  
Daya dukung air (DDA) Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 0,79 yang berarti termasuk dalam kategori “buruk/terlampau”.
- 2) Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  - a) Indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin terdiri dari 197 indikator TPB kewenangan kabupaten ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan)
  - b) Capaian TPB pilar Pembangunan Sosial  
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 51 indikator TPB (53,13%) mencapai

target, 32 indikator TPB (33,33%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 48 indikator TPB (50%) mencapai target, 35 indikator TPB (36,46%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 53 indikator TPB (55,21%) mencapai target, 30 indikator TPB (31,25%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada data.

c) Capaian TPB pilar Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 25 indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB (32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data.

- d) **Capaian TPB pilar Pembangunan Lingkungan**  
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 13 indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) belum mencapai target dan 13 indikator TPB (41,94%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (41,94%) tidak/belum ada data.
  - e) **Capaian TPB pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**  
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 5 indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 5 indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data.
- 3) Hasil Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan
- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan
  - b) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar

- c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- d) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- e) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bapellitbang. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. Rantau: Bapellitbang; 2023.
2. BPS-Kabupaten-Tapin. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2022. Rantau: BPS Kabupaten Tapin; 2023.
3. KLHK. Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah. Jakarta: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS); 2019.
4. Latue PC, Rakuasa H. Analisis spasial daya dukung lahan permukiman di Kota Ternate. *Jurnal JUKIM*. 2023;2(3):12-6.
5. Sabila S. Daya dukung pangan dalam mendukung ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*. 2020;7(1).
6. Maabut, Adrianus, Katiandagho TM, Laoh OEH. Pemetaan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*. 2016;12(2):87-94.
7. Huang CJ, Ho YH. Governance and economic growth in Asia. *The North American Journal of Economics and Finance*. 2017;39(100):260-72.

## GLOSARIUM

SINGKATAN	PENJELASAN
ex-ante	KLHS dibuat sebelum KRP selesai dibuat atau ditentukan
ex-post	KLHS dibuat setelah KRP selesai dibuat atau ditentukan
mutantis mutandis	berlaku sama dalam hal pelaksanaan

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Andy Mizwar, S.T., M.Si.**



Lahir di Banjarmasin, 7 Juli 1980. Menyelesaikan S-1 Teknik Lingkungan di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta tahun 2004. Melanjutkan S-2 di Program Magister Pengelolaan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogya-

karta dan lulus tahun 2006. Memperoleh gelar Doktor dari Departemen Teknik Lingkungan ITS Surabaya pada tahun 2016. Sejak 2008 aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian pengelolaan sampah dan limbah B3, dan Kajian Lingkungan. Aktif juga sebagai profesional tim penyusun Amdal pada LPJP PT. Hayuningrat Environmental Consultant.

Alamat korespondensi : andymizwar@ulm.ac.id

### **Dr.Eng. Maya Amalia, S.T., M.Eng..**



Lahir di Banjarmasin, 03 Mei 1982. Menyelesaikan S-1 Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2004. Melanjutkan S-2 di Program Magister Teknik Sipil UGM Yogyakarta dan lulus tahun 2011.

Memperoleh gelar Doktor Engineering dari Saga University Jepang pada tahun 2020. Sejak 2005 aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian pengelolaan sumberdaya air khususnya irigasi dan bangunan air. Mulai tahun 2023 menduduki jabatan selaku Kepala Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat periode 2023-2027. Karya Buku yang telah diterbitkan yaitu Rekayasa Sungai pada tahun 2022.

Alamat korespondensi : m.amalia@ulm.ac.id

### **Muhammad Abrar Firdausy, S.T., M.T.**



Lahir di Banjarmasin, 19 Januari 1991. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di SDN Sungai Paring 1 tahun 2003, SMPN 1 Martapura tahun 2006 dan SMAN 1 Martapura tahun 2009. Melanjutkan

pendidikan S-1 Teknik lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat (lulus tahun 2014) dan S-2 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya (lulus tahun 2016).

Penulis merupakan staf pengajar di Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sejak 2017 sampai sekarang. Menulis beberapa buku dan yang terakhir berjudul “Polusi Tak Terlihat : Mengkuak Realitas Mikroplastik di Lingkungan Kita” pada tahun 2024.

## **Muhammad Azwar Ramadhani, S.T., M.T.**



Lahir di Tanah Grogot, 24 Maret 1992. Menyelesaikan S-1 Teknik Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2015. Melanjutkan S-2 di Program Magister Teknik Sanitasi Lingkungan ITS Surabaya dan lulus tahun 2018.

Penulis merupakan Dosen pengajar di Fakultas Teknik dan Konservasi di Universitas Muhammadiyah Berau sejak 2022 sampai sekarang. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis antara lain “Kajian Zona Pelayanan, Prioritas dan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik” dan “Pengembangan Konsep Ekowisata Pulau Kecil Mandiri Bidang Waste Management/Pengelolaan Limbah Pulau Maratua, Kabupaten Berau – Kalimantan Timur”.

Alamat korespondensi : [azwarenvromft@gmail.com](mailto:azwarenvromft@gmail.com)

## **Lenalda Febriany Santosa, S.T., M.T.**



Penulis lahir di Banjarbaru, 14 Februari 1997. Lulus S-1 di Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru tahun 2020 dan lulus S-2 di Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2022. Penulis merupakan staf di PT Hayu

ningrat Environment Consultant sejak 2023 hingga sekarang. Penulis terlibat dalam penyusunan beberapa dokumen KLHS pada beberapa kota/kabupaten lainnya.

### **Muhammad Akbar, S.T., M.Ling.**



Lahir di Kuala Kapuas pada 28 Agustus 1997. Penulis menempuh pendidikan dasar di MIN Selat Unit 2 Kapuas, sekolah menengah pertama di MTsN Selat Kapuas dan sekolah menengah atas di MAN Selat Kapuas.

Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan sarjana di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat dan pendidikan pascasarjana di Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Sejak tahun 2020 hingga sekarang penulis bekerja sebagai konsultan lingkungan di PT. Hayuningrat Environment Consultant.

## SINOPSIS BUKU

Penyusunan “**KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045**” merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini menyoroti capaian dan tantangan pembangunan daerah selama periode RPJPD 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka strategis untuk RPJPD 2025-2045 yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Buku ini membahas analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tapin pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan,

seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

# **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

## **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

### **Kabupaten Tapin 2025-2045**

Buku ini membahas analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tapin pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.



Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin 70123  
Telp/Fax. 0511 – 3305195  
ANGGOTA APPTI (004.035.1.03.2018)